



STATISTIK PERUMAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2018

<https://yogyakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



<http://yogyakarta.bps.go.id>

**STATISTIK PERUMAHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2018**

STATISTIK PERUMAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2018

No. Katalog : 3303002.34
No. ISSN : 2656-2588
No. Publikasi : **34520.1902**
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 112 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Penyunting oleh:

Bidang Statistik Sosial

Desain Kover:

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh :

PT. Pohon Cahaya Semesta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian datau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

TIM PENYUSUN BUKU

**STATISTIK PERUMAHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2018**

Penanggung Jawab : Johanes De Britto Priyono

Editor : Soman Wisnu Darma
Alwan Fauzani

Naskah : Istanti

Pengolah Data : Istanti

Pemeriksa Data : Hardana

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Perumahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 ini merupakan publikasi rutin edisi yang ke empat. Terbitnya publikasi adalah sebagai salah satu pemanfaatan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional(Susenas) Tahun 2018. Susenas diilustrasikan ke dalam bentuk tabulasi serta grafik yang mencakup karakteristik tempat tinggal dan indikator perumahan. Disamping itu, untuk membantu agar lebih mudah dipahami, buku ini juga dilengkapi dengan analisa sederhana.

Data indikator perumahan disajikan secara spacial agar dapat memberikan informasi pencapaian serta keterbandingan antar wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya data juga akan disajikan dalam bentuk series yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan evaluasi pelaksanaan pembangunan berbasis perumahan. Selain itu, data series sekaligus dapat sebagai pertimbangan perencanaan program kebijakan pembangunan periode berikutnya.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai dengan terbitnya buku ini. Kami menyadari tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan publikasi selanjutnya. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi pengguna data.

Yogyakarta, Maret 2019

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Johanes De Britto Priyono, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan Penulisan.....	5
1.3. Manfaat Penulisan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
II RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI.....	9
2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data.....	11
2.2. Konsep dan Definisi.....	11
III KARAKTERISTIK PERUMAHAN.....	21
3.1. Bangunan Tempat Tinggal.....	24
3.1.1. Status Bangunan Tempat Tinggal.....	24
3.1.2. Luas Bangunan Tempat Tinggal.....	26
3.2. Kualitas Bangunan Rumah Tempat Tinggal.....	28
3.2.1. Jenis Lantai Terluas.....	29
3.2.2. Jenis Atap Terluas.....	30
3.2.3. Jenis Dinding Terluas.....	31
3.3. Fasilitas Rumah.....	33
3.3.1. Sumber Penerangan.....	33
3.3.2. Sumber Air Minum.....	35
3.3.3. Fasilitas Tempat Buang Air Besar.....	38
3.3.4. Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak.....	43
IV INDIKATOR PERUMAHAN.....	47
4.1. Akses Air Minum Layak.....	50
4.2. Sanitasi Layak.....	53
4.3. Rumah Tangga Kumuh.....	56
4.4. Rumah Layak Huni.....	60
V PENUTUP.....	63
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	: Presentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Air Minum Layak 2018.....	52
Tabel 4.2.	Presentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Akses terhadap Sanitasi 2018.....	55
Tabel 4.3.	Presentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Rumah Kumuh 2018.....	58
Tabel 4.4.	Presentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Rumah Layak Huni 2018.....	60

<https://yogyakarta.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Presentase Rumah Tangga yang Menempati Bangunan Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri, 2017-2018.....	25
Gambar 3.2	: Presentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per kapita, 2017-2018..	27
Gambar 3.3	: Perkembangan Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dan Kuintil Pengeluaran 2018.....	29
Gambar 3.4	: Presentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas dan Kabupaten/kota, 2018.....	31
Gambar 3.5	: Presentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas, 2017-2018...	32
Gambar 3.6	: Presentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama , 2017-2018.....	34
Gambar 3.7	: Presentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum, 2018.....	36
Gambar 3.8	: Presentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Leding, 2018.....	37
Gambar 3.9	: Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2018.....	39
Gambar 3.10	: Presentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan, 2017-2018.....	40
Gambar 3.11	: Presentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja 2018.....	41
Gambar 3.12	: Presentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar untuk Memasak, 2017-2018.....	43
Gambar 3.13	: Presentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar untuk Memasak Kayu Bakar, 2018.....	44
Gambar 4.1	: Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak, 2018.....	51
Gambar 4.2	: Presentase Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Layak, 2018.....	54
Gambar 4.3	: Presentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Kumuh, 2017-2018.....	57

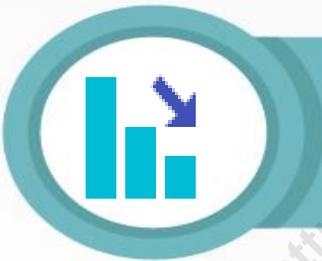
Gambar 4.4 : Presentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni, 2018..... 61

<https://yogyakarta.bps.go.id>

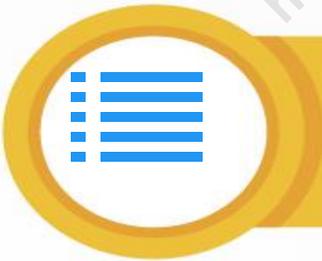
PENDAHULUAN



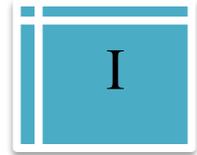
Latar Belakang



Maksud dan Tujuan



Sistematika Penulisan



1.1.Latar Belakang

Pada kondisi saat ini, rumah merupakan kebutuhan fundamantel bagi seluruh masyarakat dunia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Selain sebagai tempat tinggal, rumah merupakan tempat dan sarana berkumpul seluruh anggota rumah tangga untuk melepas lelah, kejenuhan dan ajang sosialisasi baik antar anggota rumah tangga maupun berbagai elemen di masyarakat. Begitu pentingnya tempat tinggal tersebut, rumah yang nyaman, sehat, asri dan layak huni akan memunculkan ide-ide baru dalam upaya memperbaiki ekonomi rumah tangga hingga membentuk generasi muda yang cemerlang, produktif, dan inovatif.

Akan tetapi keterbatasan sumber daya ekonomi, kemampuan kepemilikan lahan menjadikan rumah yang berkualitas tidak dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dengan berbagai level pendapatan. Masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan tidak punya lahan yang cukup belum tentu dapat membeli rumah sehat dengan harga yang terjangkau.

Namun demikian, apapun alasannya pemerintah berkewajiban dalam penyediaan rumah layak huni bagi semua seperti yang diamatkan dalam UUD 1945 ayat 28 H (1) yakni “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Tak hanya di Indonesia, masyarakat duniapun sepakat untuk bertekad mewujudkan rumah nyaman. Tertuang dalam target SDG’s 11 yaitu terwujudnya akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau bagi semuanya di tahun 2030.

Dengan kata lain, menjadi tantangan pemerintah tidak hanya tersedianya rumah bagi semua kalangan, akan tetapi juga memastikan semua penduduk dapat mengakses rumah yang nyaman, sehat, dan layak. Pada hakekatnya rumah adalah memiliki multifungsi. Selain yang disebutkan sebelumnya, rumah juga sebagai lambang kesejahteraan atau status sosial bagi penghuninya (Azwar, 1996; Mukono, 2000). Kualitas rumah juga dinilai dari sisi kelayakan dan kesehatan kualitas bangunan rumah. Di lain pihak, keberadaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki akan memberi nilai lebih sebuah hunian rumah tangga.

Bagaimana kriteria rumah yang sehat, nyaman, layak huni dan tidak kumuh? Dalam menilai suatu kondisi bangunan rumah ini diperlukan ukuran atau indikator yang akurat, dibandingkan dan mampu memberikan perkembangan kondisi perumahan suatu wilayah. Data tentang indikator perumahan yang valid, akurat dan uptodate akan menjadi acuan pengambil kebijakan dalam mengevaluasi, memonitoring, dan menentukan perencanaan pembangunan perumahan suatu wilayah.

Saat ini, dalam mengatasi permintaan kebutuhan rumah bagi ekonomi kelas bawah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencanangkan beberapa program pembangunan perumahan diantaranya program sejuta rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), program bantuan stimulan perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat bagi warga miskin dengan rumah tidak layak hingga kebijakan pengentasan kawasan kumuh wilayah perkotaan melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku). Semua program ini pada hakekatnya sebagai upaya untuk mengatasi

backlog hunian di Indonesia. Menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin membutuhkan kerjasama dengan masyarakat dalam mempercepat penanganan pemukiman kumuh.

Disinilah peran BPS sebagai instansi yang dipercaya menyusun data menyediakan indikator sebagai ukuran keberhasilan program pemerintah tersebut. Sekilas, gambaran kondisi perumahan dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan tempat tinggal, sarana dan fasilitas rumah yang dimiliki serta indikator perumahan. Informasi-informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah program pemerintah telah tercapai atau sudah tepat sasaran. Publikasi “ Statistik Perumahan D.I. Yogyakarta” merupakan publikasi rutin tahunan yang memuat data tentang kondisi perumahan D.I. Yogyakarta. Berdasarkan data Susenas Maret 2018, data perumahan akan disajikan hingga level Kabupaten/kota dan menurut karakteristik rumah tangga. Bagian akhir akan dilengkapi dengan indikator perumahan seperti rumah layak huni, rumah kumuh, sanitasi layak hingga akses air minum layak.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan “Statistik Perumahan D.I. Yogyakarta 2018” ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum karakteristik rumah menurut kualitas bangunan tempat tinggal, fasilitas pendukung yang dimiliki serta indikator pendukung evaluasi pembangunan perumahan. Tujuan utama penulisan ini antara lain:

1. Mengidentifikasi karakteristik kualitas bangunan tempat tinggal secara spacial.
2. Mengidentifikasi karakteristik fasilitas pendukung bangunan tempat tinggal secara spacial.

3. Menyoroti pola indikator perumahan hingga level kabupaten/kota.
4. Mengamati kondisi perumahan di D.I. Yogyakarta menurut karakteristik rumah tangga untuk melihat kualitas, fasilitas dan indikator perumahan secara sosial ekonomi rumah tangga.

1.3. Manfaat Penulisan

1. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti dan masyarakat umum yang kensen terhadap capaian pembangunan sektor perumahan.
2. Sebagai masukan pemerintah daerah dalam monitoring dan evaluasi capaian pembangunan perumahan.
3. Sebagai masukan pembuat kebijakan terkait penentuan target dan sasaran perencanaan pembangunan sektor perumahan menurut wilayah dan karakteristik rumah tangga.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan publikasi ini terbagi ke dalam lima bagian yaitu:

- Bab 1 Pendahuluan: Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan, sistematika penulisan.
- Bab 2 Ruang lingkup dan metodologi. Bab ini berisikan ruang lingkup, sumber data, serta konsep dan definisi.
- Bab 3 Karakteristik Perumahan. Bab ini berisikan ulasan mengenai bangunan tempat tinggal, kualitas bangunan tempat tinggal dan fasilitas rumah

Bab 4 Indikator Perumahan. Bab ini berisikan ulasan mengenai akses air layak, sanitasi layak, rumah tangga kumuh, dan rumah layak huni.

Bab 5 Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dari ulasan.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI



RUANG LINGKUP



SUMBER DATA



KONSEP
DAN
DEFINISI

Gambar Vektor oleh:
FlatIcon-www.flaticon.com



2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2018 secara umum akan menyajikan data dari hasil pengumpulan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018. Dengan jumlah sampel 3760 rumah tangga, data akan ditampilkan hingga level kabupaten/kota. Selain secara special, evaluasi pembangunan perumahan tentunya memerlukan data series untuk melihat perkembangan kondisi perumahan D.I. Yogyakarta. Perbandingan data Susenas antar tahun akan melengkapi publikasi ini, sehingga diharapkan dapat mengungkap fenomena-fenomena gambaran tempat tinggal menurut kualitas bangunan maupun fasilitas yang dimiliki rumah tangga antar waktu. Bagian akhir berisi tentang indikator perumahan yang akan menilai seberapa banyak rumah yang dihuni telah masuk kategori layak huni maupun tidak kumuh.

2.2. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang dipergunakan dalam publikasi ini mengacu kepada konsep dan definisi Susenas. Konsep dan definisi yang digunakan antara lain:

1. Rumah tangga dibedakan menjadi rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga yang dicakup dalam Susenas hanya rumah tangga biasa.

Rumah tangga biasa yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak, dan anak, selain itu yang termasuk

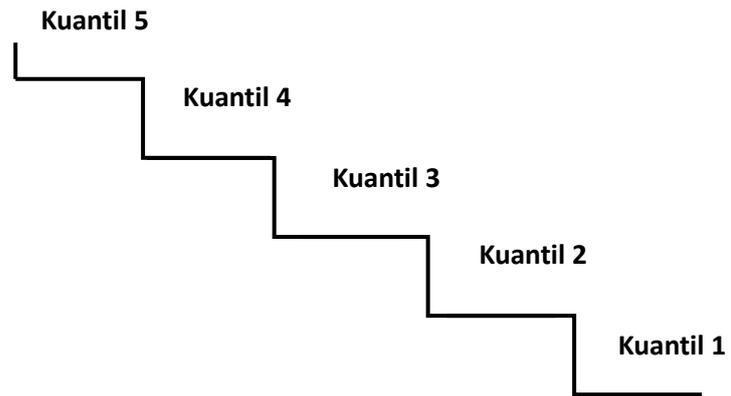
/dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain:

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
- Pondokan dengan makan (*indekost*) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
- Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

2. **Backlog** adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. *Backlog* perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah per satu rumah tangga atau kepala keluarga. *Backlog* memiliki definisi yang dilihat dari dua perspektif, yaitu

- Perspektif kependhunian *Backlog* rumah dihitung mengacu pada konsep setiap keluarga menempati satu rumah, baik itu milik sendiri, sewa, maupun milik kerabat.
- Perspektif kepemilikan *Backlog* rumah dihitung berdasarkan persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri.

3. Kuantil pengeluaran per kapita adalah pengelompokan pengeluaran rumah tangga perkapita menjadi 5. Masing-masing terdiri dari 20% kelompok pengeluaran. Kuantil 1 adalah kelompok pengeluaran terendah, naik terus hingga kuantil 5.



4. Penggunaan Bangunan :

- **Tempat Tinggal Biasa** adalah bangunan tempat tinggal yang seluruhnya hanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga saja.
- **Tempat Tinggal Campuran** adalah bangunan tempat tinggal yang sebagian dari bangunan tempat tinggal tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari rumahtangga dan sebagian lagi untuk keperluan usaha ataupun untuk keperluan lainnya.

5. Kepemilikan bangunan adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal atau rumah yang ditempati dilihat dari sisi anggota ruta yang mendiaminya. Terdiri dari milik sendiri, kontrak sewa, dst.

- **Milik sendiri**, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala ruta atau salah seorang anggota ruta. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.
- **Kontrak** jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala ruta/anggota ruta dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur

menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

- **Sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala ruta atau salah seorang anggota ruta dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
- **Bebas sewa**, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh ruta tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
- **Dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota ruta baik dengan membayar sewa maupun tidak.
- **Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

6. Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah).

7. Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas

Bahan bangunan atap dibedakan menjadi 10 jenis yaitu beton, genteng keramik, genteng metal, genteng tanah liat tradisional, asbes, seng, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia dan lainnya.

- **Beton** adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.
- **Kayu/Sirap** adalah atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

- **Lainnya** adalah jenis atap selain 9 jenis tersebut, misalnya kardus.

8. Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Jenis dinding terdiri dari jenis tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu, anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya.

- **Plesteran (anyaman bambu/kawat)** adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.
- **Batang kayu** adalah batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu.
- **Lainnya** adalah jenis dinding selain 9 jenis tersebut seperti dari seng, kardus.

9. Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/traso, semen, kayu, tanah, dan lainnya.

10. Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rusa responden

- **Bersama**, bila fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rusa responden bersama dengan beberapa rusa tertentu.
- **MCK Komunal** singkatan dari Mandi, Cuci, Kakus adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

- **Umum**, bila fasilitas tempat buang air besar dapat digunakan oleh setiap ruta, termasuk ruta responden.

11. Jenis Kloset

- **Kloset** adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus.
- **Kloset leher angsa** adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

12. Tempat pembuangan Akhir Tinja

- **Tangki** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya baik mempunyai bak resapan maupun tidak.
- **SPAL** adalah Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah ruta tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.

13. Sumber Air Minum

- **Leding meteran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
- **Sumur terlindung** adalah sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari sumur/perigi.

- **Air permukaan** adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

14. Sumber Penerangan

- **Listrik non PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

15. **Air Layak** : Rumah tangga dikatakan menggunakan atau mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumahtangga berasal dari leding, air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak ≥ 10 m dari penampungan kotoran/limbah, dan air hujan. Dikombinasikan dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung (leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan) bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tidak terlindungi (jarak < 10 m).

16. **Sanitasi Layak** : Rumah tangga dikatakan memiliki sanitasi layak apabila rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar (BAB) sendiri atau bersama, menggunakan jenis kloset yang berbentuk leher angsa atau plengsengan dengan tutup serta tempat pembuangan akhir tinja melalui tangki atau SPAL.

17. **Rumah Tangga Kumuh**: rumah tangga dengan memperhatikan kondisi rumah berdasarkan indikator

pembentuk berikut:

1. Menggunakan air yang termasuk dalam kategori air tidak layak sebagai air minum, skor = 1 dengan bobot 15 persen.
2. Menggunakan fasilitas sanitasi yang termasuk dalam kategori sanitasi tidak layak, skor = 1 dengan bobot 15 persen.
3. Luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, skor = 1 dengan bobot 35 persen.
4. Daya tahan rumah (*durability of housing*), memperhatikan beberapa persyaratan berikut:
 - 1) Jenis atap rumah terbuat dari jerami/ijuk/alang-alang/rumbia/daun atau lainnya, skor=1.
 - 2) Jenis dinding rumah terbuat dari bamboo atau lainnya, skor=1.
 - 3) Jenis lantai tanah atau lainnya, skor=1.

Rumah tangga termasuk dalam undurable jika rumah yang ditinggali memiliki skor ≥ 2 , bobot untuk indikator *durability of housing* adalah sebesar 35 persen.

Berdasarkan penilaian jumlah skor dikalikan bobot sebagaimana dijelaskan di atas, rumah dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Nilai < 35 persen, rumah tangga tidak menempati rumah kumuh.
- 2) Nilai > 35 persen, rumah tangga menempati rumah kumuh.

- 18.** Rumah tangga yang menempati **rumah layak huni** adalah rumah tangga dengan memperhatikan kondisi rumah berdasar 7 (tujuh) indikator pembentuk berikut:
- Jenis atap rumah terbuat dari jerami/ijuk/Alana-alang/rumbia/daun atau lainnya, skor = 1.
 - Jenis dinding rumah terbuat dari bamboo atau

lainnya, skor = 1.

- Jenis lantai tanah atau lainnya, skor = 1.
- Luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, skor = 1.
- Sumber penerangan bukan listrik, skor = 1.
- Menggunakan air yang termasuk dalam kategori air tidak layak sebagai air minum, skor = 1.
- Menggunakan fasilitas sanitasi yang termasuk dalam kategori sanitasi tidak layak, skor = 1.

Berdasarkan penilaian jumlah skor sebagaimana dijelaskan diatas, rumah dikelompokan menjadi tiga kategori yaitu:

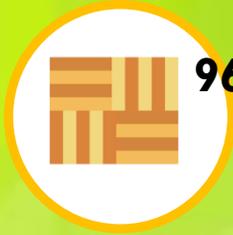
- Rumah tangga yang menempati rumah layak huni, total skor 0-2.
- Rumah tangga yang menempati rumah rawan layak huni, total skor 3-4.
- Rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni, total skor 5-7.

Karakteristik Perumahan 2018



76,54%

Menempati rumah
milik sendiri



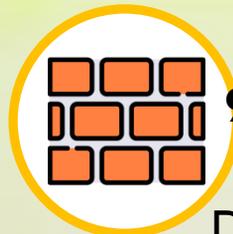
96,19%

Luas lantai
per kapita $\geq 7,2\text{m}$



95,57%

Atap
Genting



94,70%

Dinding
Tembok



97,88%

Kloset
Leher angsa



73,15%

Bahan Bakar
Memasak Elpiji



76,63%

Sumber Air
Minum Bersih

KARAKTERISTIK PERUMAHAN

Rumah merupakan kebutuhan dasar sekaligus sebagai ukuran derajat kesehatan penghuninya. Menurut peraturan pemerintah no 14 tahun 2016, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni merupakan tempat tinggal yang memenuhi prasyarat kesehatan sehingga penghuninya selain nyaman juga sehat. Berawal dari hunian rumah yang layak huni maka akan memunculkan kreatifitas, ide-ide cemerlang diikuti dengan tumbuhnya generasi muda yang berkualitas.

Selanjutnya, karakteristik rumah yang ideal menjadi dambaan berikutnya untuk menjamin rumah berfungsi dan bermanfaat bagi penghuninya. Selain harus memenuhi syarat sebagai tempat tinggal yang layak huni, sehat dan nyaman, juga kualitas bangunan yang tahan lama dan kuat konstruksinya. Dengan demikian, rumah dapat digunakan untuk tempat berlindung, bernaung, dan beristirahat, sehingga menimbulkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani, sosial.

Menurut Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, parameter yang digunakan untuk penilaian rumah sehat terdiri dari tiga komponen yaitu komponen rumah, sarana sanitasi dan perilaku penghuni. Komponen rumah meliputi bagian fisik rumah seperti kualitas dinding, lantai, atap, pencahayaan, kepadatan penghuni. Sementara sarana sanitasi antara lain sarana air bersih, jamban. Dengan kata ini, rumah sehat merupakan bangunan tempat berlindung serta sebagai sarana pembinaan

keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif. Oleh karena itu, keberadaan perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik. Lebih lanjut, pembangunan sumber daya manusia melalui upaya mewujudkan perumahan yang sehat, layak huni bagi semua akan mendorong percepatan peningkatan produktivitas sekaligus kreatifitas masyarakat.

3.1. Bangunan Tempat Tinggal

3.1.1. Status Bangunan Tempat Tinggal

Kepemilikan tempat tinggal atau rumah merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana rumah sekaligus menjadi awal untuk mencapai rumah tangga yang sejahtera. Akan tetapi, meskipun rumah sebagai kebutuhan mendasar bagi seluruh rumah tangga, namun tidak semua rumah tangga dapat memperoleh tempat tinggal tersebut dengan mudah. Perbedaan faktor ekonomi, kemampuan keuangan untuk mendapatkan rumah dengan harga murah kian sulit. Salah satunya akibat ketersediaan tanah yang semakin sempit sehingga menyebabkan harga properti semakin mahal.

Pada akhirnya, rumah tangga akan memilih rumah sebagai tempat tinggal sesuai dengan kemampuan yaitu dengan kontrak/sewa, bebas sewa atau menempati rumah dinas. Selain faktor ekonomi, lokasi rumah yang strategis dekat dengan tempat kerja atau fasilitas umum menjadi poin penentu berikutnya. Desawa ini masalah penyediaan rumah masih menjadi perhatian krusial bagi pemerintah melalui Kemenpera.

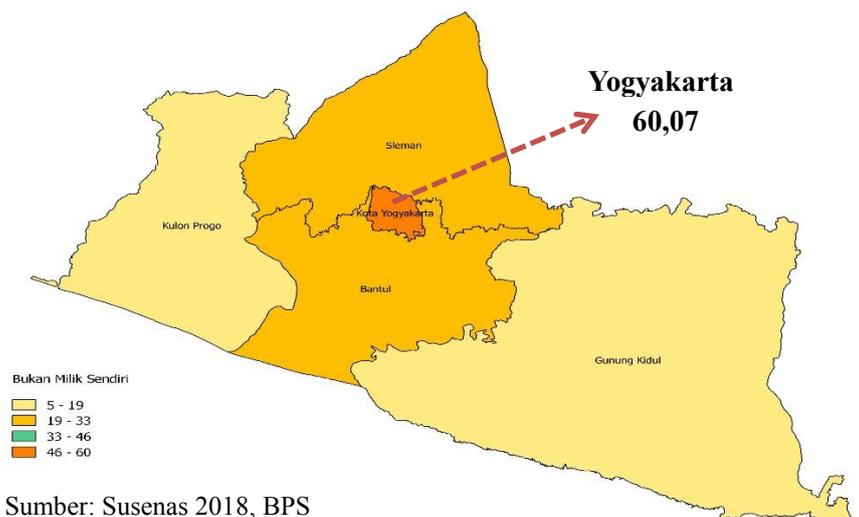
Indikator yang digunakan oleh pemerinth untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah, salah satunya adalah

backlog rumah. *Backlog* rumah dihitung dengan menggunakan prespektif kepemilikan atau prespektif penghunian. Dari prespektif kepemilikan, *backlog* dihitung berdasarkan presentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sedangkan prespektif penghunian, kebutuhan rumah mengacu pada mengacu pada konsep setiap keluarga menempati satu rumah, baik itu milik sendiri, sewa, maupun milik kerabat.

Data Susenas menyajikan analisis *backlog* dengan prespektif kepemilikan. Melalui data tersebut dapat tergambar penyediaan rumah berdasarkan presentase rumah tangga yang belum menempati rumah sendiri. Susenas Maret 2018 menunjukkan bahwa sebesar 76,54 persen rumah tangga telah menempati rumah milik sendiri. Ini berarti 23,46 persen rumah tangga di D.I. Yogyakarta masih mendiami rumah bukan milik sendiri seperti kontrak/sewa, bebas sewa atau lainnya. Angka tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang masih tercatat 24,74 persen rumah tangga. Meski, menunjukkan hasil yang baik, pemerintah tetap fokus untuk mengatasi kekurangan rumah(*backlog*) tersebut. Hal ini mengingat kebutuhan rumah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya rumah tangga.

Gambar 3.1
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Bangunan Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri, 2017-2018

Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri di Kota Yogyakarta mencapai **60,07 persen**



Sumber: Susenas 2018, BPS

Jika dianalisis menurut kabupaten/kota, lebih dari 90 persen rumah tangga di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul telah menempati rumah milik sendiri. Kepadatan rumah tangga yang masih rendah, memungkinkan tersedia lahan yang cukup untuk pembangunan rumah milik sendiri. Artinya bila rumah tangga harus membeli tanah atau rumah, harga tanah atau properti masih terjangkau. Tercatat kepadatan rumah tangga per km² di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul baru mencapai 202 dan 142.

Dilain pihak, Kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi, kota pendidikan serta pusat ekonomi, tingkat kepadatan rumah tangga per km² sudah di angka 4.512. Terkonsentrasinya penduduk di wilayah perkotaan tersebut adalah untuk mencari nafkah sehingga lahan menjadi sempit, akhirnya berimbas pada melambungnya harga rumah. Inilah menjadi pilihan rumah tangga ekonomi rendah untuk menempati rumah dengan sistem kontrak/sewa.

Hasil Susenas Maret 2018, memperlihatkan bahwa sebesar 39,93 persen rumah tangga di Kota Yogyakarta yang baru menempati rumah milik sendiri. Sementara rumah tangga yang bertempat tinggal dengan sistem sewa/kontrak, bebas sewa atau lainnya mencapai 60,07 persen. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan rumah tangga di wilayah terkonsentrasi ekonomi belum diimbangi dengan ketersediaan rumah. Manjadi tantangan pemerintah bukan hanya menyediakan rumah, namun juga ditunjang dengan harga rumah yang terjangkau, kemudahan akses dengan perbankan bagi semua kalangan ekonomi.

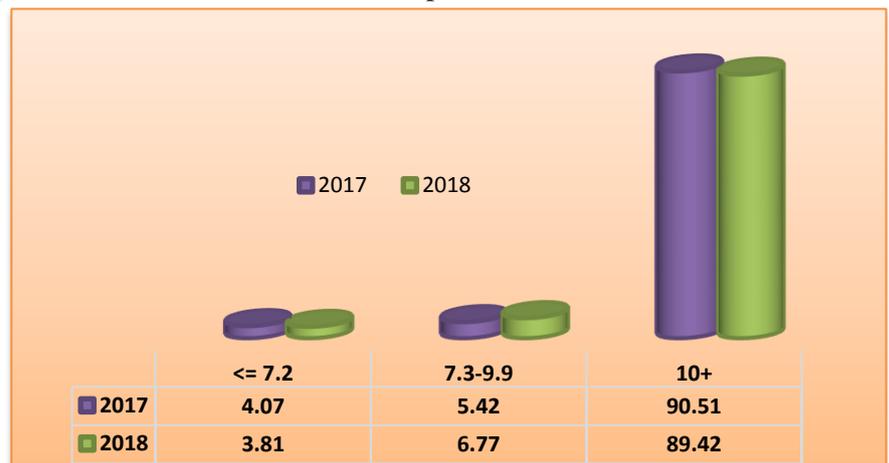
3.1.2. Luas Bangunan Tempat Tinggal

Menghuni rumah yang nyaman merupakan dambaan setiap anggota rumah tangga. Salah satu kenyamanan suatu tempat tinggal adalah menempati rumah yang didalamnya

semua penghuni dapat beraktifitas dengan leluasa tanpa diganggu dengan kondisi rumah berjubel (*overcrowded*) karena jumlah penghuni rumah melewati dari standar kesehatan. Menurut UU No 11 tahun 2011 tentang perumahan, luas hunian minimum rumah adalah 36 m². Bila asumsi setiap rumah tangga terdiri dari 5 art maka luas minimum perkapita adalah = 7,2 m².

Bangunan tempat tinggal yang terlalu sempit akan berdampak kurang baik terhadap kesehaan penghuninya. Disamping menyebabkan kurangnya konsumsi O₂, maka seandainya salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain. Data menunjukkan bahwa luas lantai perkapita lebih dari dari 7,2 m² pada tahun 2018 mencapai 96,19 persen. Artinya sekitar 96 dari 100 rumah tanga telah menempati bangunan yang layak. Kondisi ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang masih mencapai 95,93 persen.

Gambar 3.2.
Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Perkapita, 2017-2018



Sumber: Susenas 2017-2018, BPS

Rumah tangga yang menempati luas lantai perkapita lebih dari 7,2 m² tahun 2018 sebesar 96,19 persen rumah tangga.

Ini cukup menggembirakan adalah lebih dari 95 persen rumah tangga dari kabupaten kota telah menempati bangunan dengan luas lebih d ari 7,2 persen perkapita. Hanya Kota

Yogyakarta saja yang baru mencapai 87,74 persen. Seperti diulas sebelumnya, ini adalah wajar dimana sebagai kota Pendidikan, pusat ekonomi menjadi daya Tarik tersendiri penduduk luar wilayah tersebut berpindah dari luar Kota Yogyakarta untuk menempuh Pendidikan atau mencari nafkah. Akan tetapi, menurut status ekonomi rumah tangga, tidak terjadi perbedaan yang nyata dalam hal penghunian tempat tinggal dengan laus lantai lebih dari 7,2 m². Masing-masing telah mencapai lebih dari 94,30 persen. Artinya, luas lantai perkapita menurut standar kesehatan sudah hampir terpenuhi untuk seluruh jenjang ekonomi rumah tangga.

3.2. Kualitas Bangunan Rumah Tempat Tinggal

Rumah sebagai tempat tinggal selain aman, juga diperlukan kenyamanan dan memberikan efek sehat bagi penghuninya. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang prasyarat kesehatan rumah, kualitas komponen rumah diberikan bobot 31 persen. Ini adalah suatu tanda bahwa kualitas bangunan tempat tinggal sangat menunjang agar rumah memberikan manfaat yang maksimal bagi penghuninya. Ini dipertegas dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sanropie dkk. (1991) bahwa rumah sehat sebagai tempat berlindung atau bernaung dan tempat untuk beristirahat, sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna, baik fisik, rohani maupun sosial. Salah satu persyaratan rumah sehat harus memenuhi kebutuhan fisiologis/konstruksi bangunan.

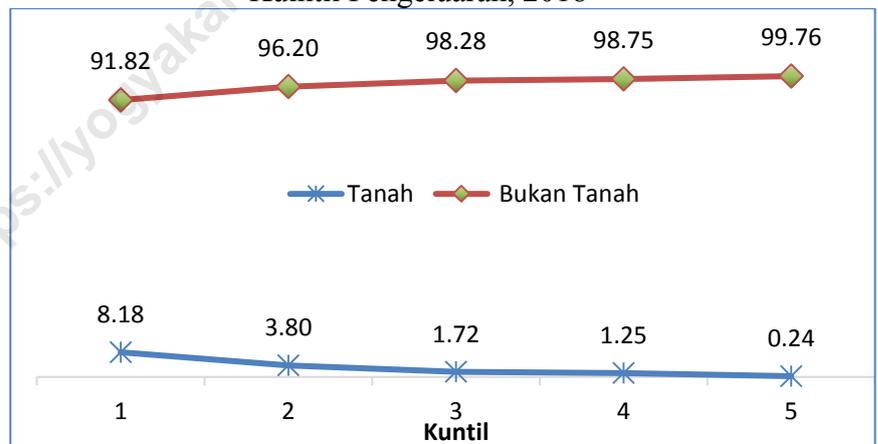
Berbagai penelitian mengungkapkan derajat kesehatan juga ditentukan oleh komponen rumah seperti jenis luas lantai terluas, dinding, atap serta penerangan bangunan tempat tinggal. Masing-masing komponen memiliki kriteria sehingga suatu rumah dapat dikatakan rumah sehat. Konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar kesehatan beresiko

sebagai sumber penularan beberapa penyakit.

3.2.1. Jenis Lantai Terluas

Prasyarat rumah sehat adalah lantai yang tidak kedap air yaitu lantai yang tidak dalam keadaan kering dan tidak lembab. Lantai yang berdebu atau becek selain tidak nyaman juga bisa menjadi sarang penyakit. Dengan kata lain, bahan jenis lantai berhubungan dengan penyakit menular seperti diare bagi balita. Bahan lantai rumah sehat harus kedap air dan mudah dibersihkan, paling tidak perlu diplester dan akan lebih baik kalau dilapisi ubin atau keramik yang mudah dibersihkan (Depkes, 2002).

Gambar 3.3.
Presentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dan Kuintil Pengeluaran, 2018



Sumber; Susenas 2018, Susenas diolah

Sebanyak 3,04 persen rumah tangga tahun 2018 masih bertempat tinggal dengan jenis lantai tanah.

Secara umum, lebih dari 96,96 persen penduduk D.I. Yogyakarta pada tahun 2018 telah mendiami rumah dengan lantai bukan tanah. Artinya, masih terdapat sekitar 3,04 persen rumah tangga masih menggunakan rumah berlantai tanah. Kemudian bila dilihat lebih detil, mayoritas rumah tangga menggunakan keramik (61,10%), semen/batu bata merah (25,78%) dan ubin/tegel/teraso (8,70%). Walaupun penggunaan lantai tanah relatif sedikit, menjadi tantangan

perintah untuk terus mencegah wabah penyakit menular melalui lantainisasi.

Menurut status ekonomi tampak bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi rumah tangga, semakin rendah presentase rumah tangga yang masih menghuni rumah berlantai bukan tanah. Sebanyak 8,18 persen rumah tangga ekonomi kelas bawah masih menghuni rumah berlantai bukan tanah dan untuk rumah tangga kelompok ekonomi tertinggi masih sekitar 0,24 persen. Pemakaian tanah sebagai lantai tempat tinggal menurut Sanropie (1989), sebaiknya tidak digunakan lagi, sebab bila musim hujan akan lembab sehingga dapat menimbulkan gangguan/penyakit terhadap penghuninya.

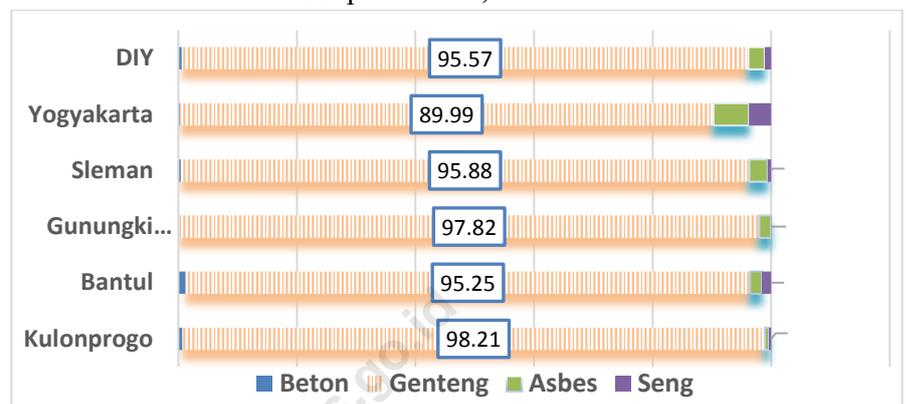
3.2.2. Jenis Atap Terluas

Atap berfungsi untuk melindungi isi ruangan rumah dari gangguan angin, hujan dan panas, juga melindungi isi rumah dari pencemaran udara (debu, asap dan lain-lain). Pemilihan jenis atap tergantung dengan kondisi wilayah tenoat tinggal. Seperti daerah tropis, paling bagus menggunakan genting sebagai atap. Selain harganya terjangkau oleh masyarakat, genting dari tanah liat bersifat sebagai isolator, sejuk di musim panas dan hangat di musim hujan. Sebaliknya, atap dari seng dan asbes sebaiknya tidak digunakan, karena selain mahal juga menimbulkan suhu panas didalam rumah (Mukono, 2000).

Hingga tahun 2018, jenis atap yang paling banyak di gunakan di D.I. Yogyakarta adalah genting(95,57 persen). Sementara itu, masih ditemukan rumah tangga memakai seng dan asbes, masing-masing sebesar 1,12 persen dan 2,73 persen. Menurut kabupaten/kota, hampir semua rumah tangga di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul telah menggunakan atap jenis genting. Hanya kurang dari 2 persen yang masih beratap seng atau asbes. Sementara itu,

penggunaan genteng paling rendah di Kota Yogyakarta. Tepatnya 89,99 persen. Justru sebanyak 9,74 persen rumah tangga memilih atap jenis seng/asbes.

Gambar 3.4.
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas dan Kabupaten/kota, 2018



Sumber: Susenas 2018, BPS.

Atap seng/asbes masih digunakan oleh 9,74 persen rumah tangga di Kota Yogyakarta

Pemilihan atap seng atau asbes tersebut disinyalir mulai merebaknya perumahan yang berkembang sekarang ini mulai melirik genteng yang berbahan baku dari seng seperti galvalume. Ini menjadi catatan penting pemerintah Kota Yogyakarta bahwa dalam jangka panjang penggunaan seng dan asbes berbahaya bagi kesehatan penghuni rumah.

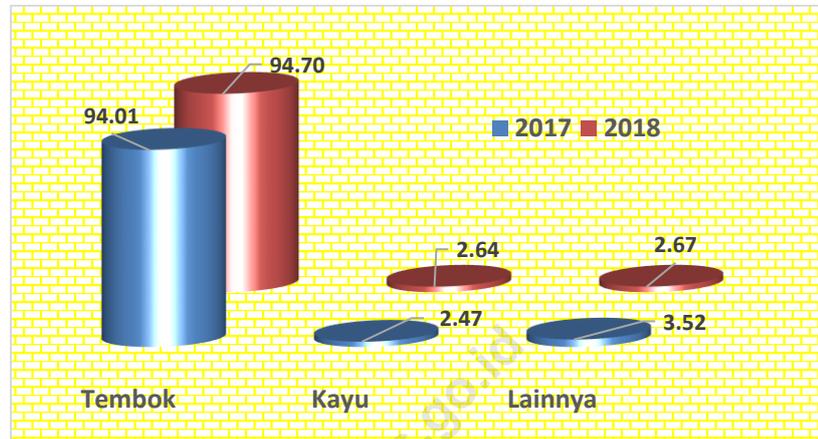
3.3.3. Jenis Dinding Terluas

Dinding berfungsi sebagai pendukung/penyangga atap dan melindungi ruangan rumah dari gangguan/serangan hujan dan angin, juga untuk melindungi dari pengaruh panas dan angin dari luar. Bahkan yang tidak kalah penting dinding juga berfungsi untuk menjaga kerahasiaan (*privacy*) penghuninya.

Seperti jenis atap, pemilihan jenis dinding juga tergantung dengan kondisi wilayah tempat tinggal. Dinding dari batu (pasangan batu/bata) adalah bahan dinding rumah yang paling baik karena bahan dari batu tahan terhadap api (Sanropie dkk., 1991). Akan tetapi jenis dinding yang tahan

terhadap segala cuaca adalah dinding dari bahan kayu dan bambu, namun bahan dinding ini umumnya mudah terbakar.

Gambar 3.5.
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas,
Tahun 2017-2018



Sumber: Susenas 2017-2018, BPS

Penggunaan dinding tembok tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017

Gambar 3.5 Menunjukkan bahwa rumah tangga di D.I. Yogyakarta selama tahun 2017-2018 memilih tembok sebagai dinding bangunan tempat tinggal semakin meningkat. Tercatat rumah tangga bertempat tinggal dengan dinding tembok tahun 2018 telah mencapai 94,70 persen atau meningkat 0,17 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Kabupaten/kota, capaian terendah rumah tangga yang tinggal di rumah berdinding tembok adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 84,65 persen disusul oleh Kabupaten Kulonprogo mencapai 86,82 persen. Ini memperlihatkan bahwa lebih dari 13 persen rumah tangga masih memilih menempati rumah berdinding bukan tembok.

Tanaman keras dan bambu banyak tumbuh subur. Jenis tanaman keras seperti kayu dan anyaman bambu dipergunakan sebagai dinding. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Kedua jenis bahan dinding ini mudah diperoleh

di wilayah tersebut sebagai penghalang longsor dan penyimpan air di musim hujan.

3.3. Fasilitas Rumah

Bukan hanya kualitas bangunan tempat tinggal, sarana dan perlengkapan rumah yang dimiliki suatu rumah tangga akan lebih mendukung rumah sebagai tempat beristirahat, mencari ide kreatif dan meningkatkan produktifitas seluruh anggota rumah tangga. Tentu kepemilikan perlengkapan rumah ini tetap tidak terlepas dari kriteria yang memenuhi agar rumah dikatakan sebagai tempat tinggal yang sehat.

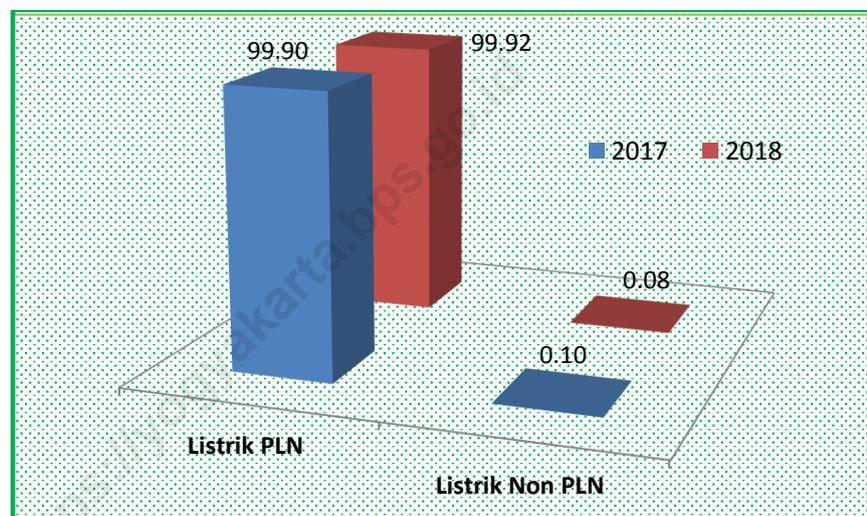
Sarana dan prasarana rumah ini meliputi sarana pencahayaan rumah dan sarana sanitasi. Data Susenas memuat informasi pencahayaan rumah secara non alami berupa sumber penerangan rumah tangga. Sementara sarana sanitasi adalah sumber utama yang digunakan untuk air minum dan memasak, sarana buang air besar. Selanjutnya perilaku rumah tangga dalam menentukan pilihan bahan bakar memasak akan berpengaruh terhadap kualitas udara yang dihirup penghuni rumah.

3.3.1. Sumber penerangan

Sumber penerangan terbagi menjadi dua yakni sumber penerangan alami dan non alami. Sumber penerangan non alami adalah yang bersumber dari listrik atau non listrik seperti lampu pijar. Penerangan berfungsi sebagai sumber cahaya yang akan menerangi ruangan sehingga rumah menjadi nyaman dan sehat. Cahaya yang cukup untuk penerangan ruang di dalam rumah merupakan kebutuhan kesehatan manusia (Lubis, 1989., Sanropie dkk., 1991).

Sumber penerangan non alami rumah tangga D.I. Yogyakarta hingga tahun 2018, mayoritas menggunakan sumber penerangan dari listrik. Tepatnya 99,92 persen rumah tangga telah menggunakan listrik. Angka ini meningkat 0,02 poin persen dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini berarti bahwa hanya 0,08 persen saja rumah tangga yang menggunakan penerangan non listrik.

Gambar 3.6.
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utam,
Tahun 2017-2018



Sumber: Susenas 2017-2018, BPS

Bila dilihat lebih detail lagi, rumah tangga yang masih memakai sumber penerangan bukan listrik adalah di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Ini menjadi evaluasi pemerintah di kedua kabupaten agar sumber penerangan bukan listrik ditemukan di segera mengupayakan program penerangan listrik terjangkau untuk semua penduduk. Sumber cahaya yang baik dalam hal ini listrik adalah yang aman, terang, tidak menyilaukan sehingga mampu mendukung peningkatan produktifitas seluruh penghuni rumah. Cahaya buatan yang baik dan disaring dari kesilauan dapat mempertinggi produktifitas kerja dibandingkan dengan bila bekerja cahaya siang alamiah (Riviwanto dkk, 2011).

Akan tetapi menurut tingkat status ekonomi rumah tangga, pada tahun 2018 tampak bahwa rumah tangga yang menggunakan penerangan bukan listrik dari kelompok rumah tangga ekonomi terendah(kuintil 1) masih mencapai sebesar 0,38 persen. Artinya selain menurut wilayah tempat tinggal, program Indonesia terang juga sebaiknya lebih memprioritaskan masyarakat ekonomi kelas bawah disertai dengan menjaga keberlanjutan akses listrik bagi mereka. Hal ini penting mengingat keberadaan listrik bukan hanya sebagai sumber penerangan namun juga sebagai jendela masuknya peradaban(BPS: 2018).

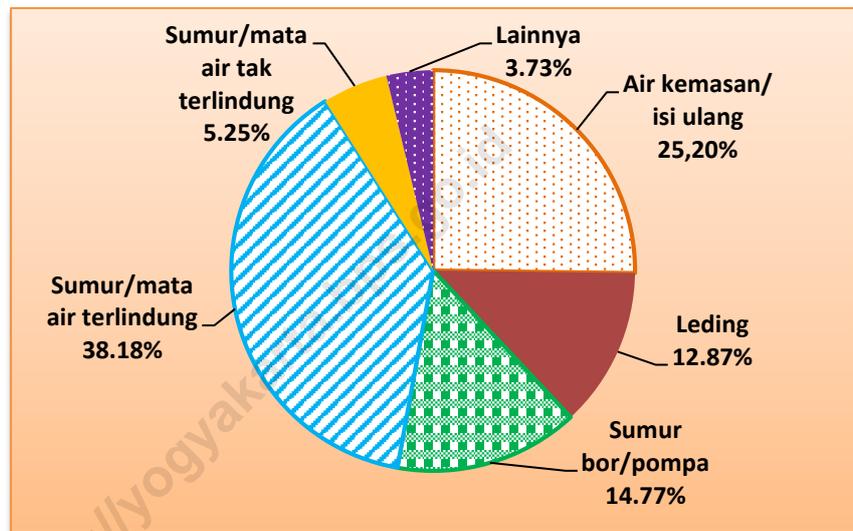
3.3.2. Sumber Air Minum

Dalam ilmu kesehatan, air minum memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Ketersediaan sumber air bersih sangat penting sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan. Seperti dalam beberapa penelitian terungkap bahwa sumber air bersih yang tersedia harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat (Mubarak, 2009).

Menurut kuantitasnya, kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mulai untuk minum dan memasa, higienis pribadi; cuci; membersihkan rumah; dan keperluan menyiram tanaman minimal sebanyak 60 liter per orang per hari. Diantara kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Untuk keperluan air minum dan masak air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia (Notoatmodjo, 2003). Selain memenuhi syarat fisik, kimia, rumah tangga harus mengkonsumsi sumber air minum yang bebas dari segala bakteri.

Kualitas air minum salah satunya ditentukan oleh sumber air minum yaitu berasal air yang dikonsumsi rumah tangga. Sumber air minum antara lain air kemasan, ledeng, pompa, sumur, mata air, air hujan, sungai dan lainnya. Penggunaan sumber air minum mempunyai andil apakah air minum yang dikonsumsi adalah air bersih dan memenuhi syarat kesehatan.

Gambar 3.7.
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum, 2018



Sumber: Susenas 2018, BPS

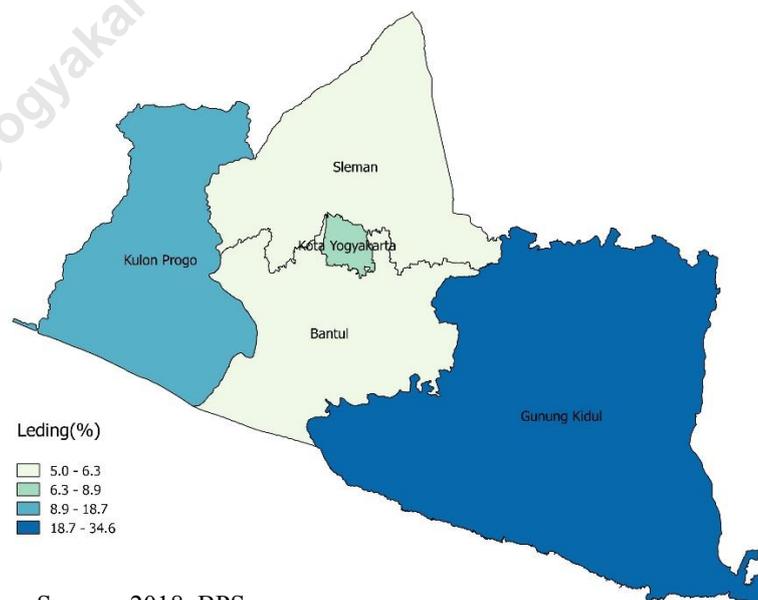
Pada tahun 2018, sebanyak 91,02 persen rumah tangga telah menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan/isi ulang, ledeng, pompa atau sumur/mata air terlindung. Hanya kurang dari 9 persen diantaranya yang sumber air minum lainnya. Menurut kabupaten/kota, sumber air minum berupa ledeng paling banyak dikonsumsi di Kabupaten Gunungkidul yaitu mencapai 34,57 persen dan meningkat 7,38 persen poin dari tahun sebelumnya. Hingga saat ini program penyediaan dan pembangunan instalasi air minum bersih masih menjadi prioritas utama. Melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) dengan dana dari APBN/APBD, APBDDesa dan swadaya dana masyarakat telah dibangun instalasi air minum bersih tersebar di 15 desa

pada 10 Kecamatan.

Namun demikian, program tersebut belum dirasakan oleh semua rumah tangga. Masih terdapat 25,15 persen rumah tangga Kabupaten Gunungkidul yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air hujan atau sungai. Kondisi topografi yang bergunung-gunung, kesulitan air minum disinyalir sebagai penyebab penggunaan sumber air minum tersebut. Sementara itu, kemudahan mengakses air kemasan/air isi ulang sehingga rumah tangga di Kota Yogyakarta (46,69%) dan Kabupaten Sleman(32,86%) telah mengkonsumsi sumber air minum tersebut.

Gambar 3.8.
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Leding, 2018

34,57 persen rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul menggunakan leding sebagai sumber air minum.



Sumber: Susenas 2018, BPS

Ditinjau menurut status ekonomi, jelas terlihat bahwa kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sumber air minum. Kesenjangan cukup tinggi tampak pada penggunaan sumber air minum dari air kemasan bermerk/air isi ulang. Semakin tinggi status ekonomi, semakin tinggi presentase rumah tangga yang

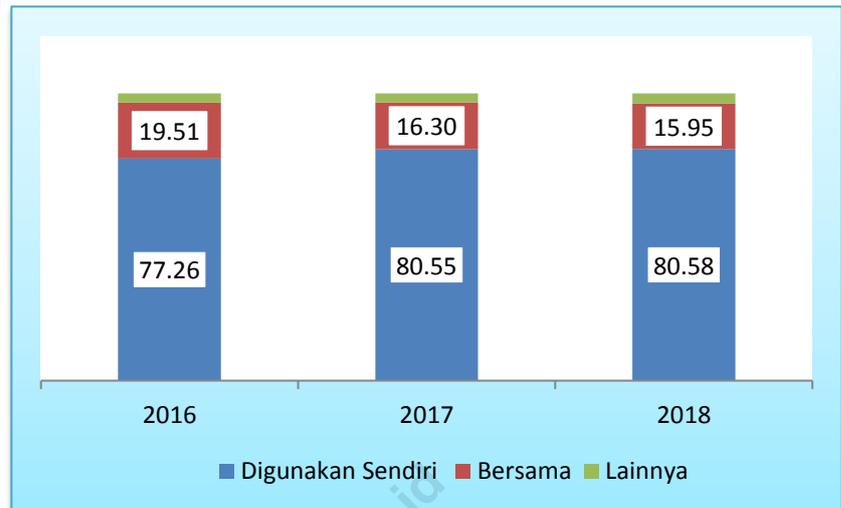
menggunakan sumber air minum air kemasan bermerk/air isi ulang. Pada rumah tangga yang status ekonomi terbawah(kuintil 1), presentase rumah tangga dengan air kemasan bermerk/air isi ulang hanya sebesar 4,24 persen dan presentase ini terus meningkat hingga pada rumah tangga dengan status ekonomi tertinggi (kuintil 5) mencapai 61,79 persen. Ini menunjukkan bahwa kemampuan rumah tangga untuk mengkonsumsi sumber air minum ini dipengaruhi oleh daya beli yang rendah di rumah tangga status ekonomi terbawah. Mayoritas rumah tangga dengan status ekonomi terbawah menggunakan sumber air minum dari sumur/mata air terlindung. Selain mudah diperoleh, sumber air minum ini diperoleh dengan tidak harus membeli.

3.3.3. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Salah satu target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 adalah mengakhiri buang air besar sembarangan (BABS). BAB yang tidak menurut aturan memudahkan terjadinya penyebaran penyakit tertentu dan penulurannya melalui tinja antara lain penyakit diare. Oleh karena itu rumah yang sehat sebaiknya memiliki tempat buang air besar sendiri. Bila digunakan dengan rumah tangga lain, pola hidup yang kurang sehat rumah tangga lain tersebut akan mempermudah penyebaran penyakit.

Salah satu sarana menuju rumah sehat adalah memiliki *septic tank*. Septi tang merupakan Tempat pembuangan limbah air yang tidak mencemarkan tanah dan air tanah serta tidak berbau. Syarat berikutnya adalah ketersediaan jamban yang selalu bersih dan tidak berbau (leher angsa). Jaraknya cukup jauh dari sumber air dan letaknya di bagian hilir air tanah(Sanropie dkk: 1991).

Gambar 3.9.
 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis
 Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2018



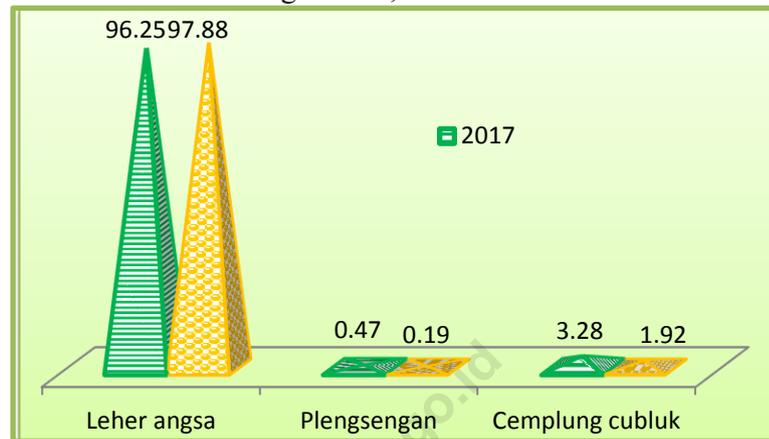
Sumber: Susenas 2016-2018, BPS

Susenas 2018, memotret kondisi sarana tempat buang air besar seperti fasilitas tempat buang air besar, jenis jamban, tempat pembuangan akhir tinja dan jarak tempat pembuangan akhir tinja. Ditinjau dari kondisi akses terhadap fasilitas tempat buang air besar di D.I. Yogyakarta sudah mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2016, presentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri masih sebesar 77,26 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2018 sudah mencapai 80,58 persen.

Secara spacial, tampak kesenjangan penggunaan fasilitas BAB antara rumah tangga di Kota Yogyakarta dengan kabupaten lainnya. Hanya 60,44 persen rumah tangga di Kota Yogyakarta yang menggunakan tempat buang air besar sendiri, sementara 4 kabupaten/kota lainnya sudah lebih dari 80 persen. Begitu penting akses fasilitas buang air besar ini telah menyita perhatian pemerintah. Sebagai upaya mempercepat target sanitasi pembangunan berkelanjutan diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016, pemerintah perlu menjamin pemenuhan

komponen rumah sehat bagi keluarga, yaitu akses/ketersediaan air bersih dan akses/penggunaan jamban sehat.

Gambar 3.10.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, 2017-2018



Sumber: Susenas 2017-2018, BPS

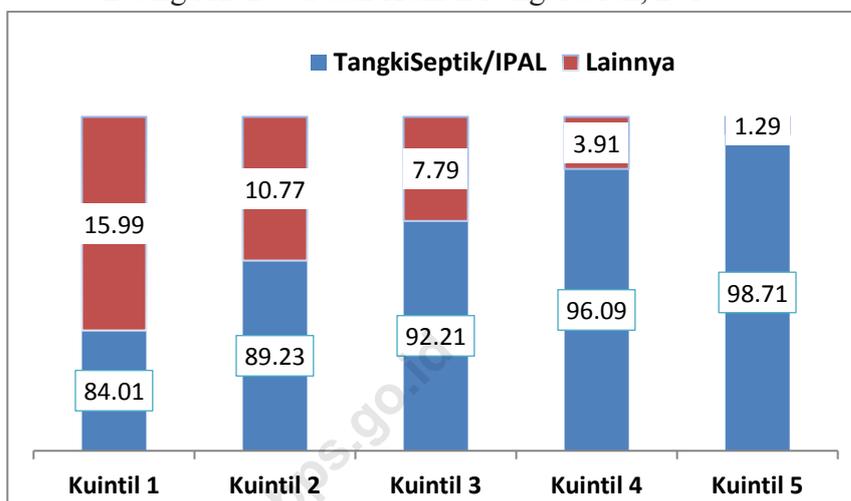
Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban leher angsa sudah mencapai 97,88 persen atau naik 1,64 persen poin dari periode sebelumnya.

Faktor kedua penilaian kualitas tempat buang air besar adalah kualitas jenis jamban. Data Susenas 2018, memperlihatkan persentase rumah tangga yang menggunakan jamban leher angsa sudah mencapai 97,88 persen atau naik 1,64 persen poin dari periode sebelumnya. Meskipun penggunaan jenis jamban yang berkualitas membaik, namun masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jenis jamban tidak memenuhi standar kesehatan. Jenis jamban plengsengan atau cemplung/cubluk masih digunakan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 6,04 persen dan 6,95 persen.

Belum tersedianya fasilitas yang kurang memadai maka beberapa rumah tangga di kedua kabupaten tersebut harus menggunakan tempat buang besar bukan di jamban leher angsa. Padahal, perilaku tersebut dapat mengancam kesehatan. Tempat pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan meningkatkan risiko terjadinya diare berdarah pada anak balita sebesar dua kali lipat dibandingkan dengan keluarga

yang mempunyai kebiasaan membuang tinjanya yang memenuhi syarat sanitasi (Entjang, 2000).

Gambar 3.11.
Presentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Tempat Buang Air Besar dan Kuintil Pengeluaran, 2018.



Sumber: Susenas 2018, BPS

Selanjutnya, aspek yang paling penting dalam menilai Kualitas tempat buang air besar adalah tempat pembuangan akhir tinja. Tempat pembuangan akhir tinja yang memenuhi standar kesehatan adalah yang tertutup dan dilapisi dengan semen. Jenis tempat pembuangan akhir tinja ini akan mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja karena jenis pembuangan akhir ini dapat mengeliminir rembesnya kotoran ke tanah dan sumber air di sekitarnya. Dari sekian jenis pembuangan akhir tinja, tangki septik/IPAL adalah yang terbaik dan memenuhi syarat kesehatan.

Pada tahun 2017 dan tahun 2018, kualitas tempat pembuangan akhir tinja sudah cukup baik. Sebagian besar atau lebih dari 92 persen rumah tangga telah memakai tangki septik atau IPAL. Namun demikian, masih terlihat ketimpangan kualitas tempat pembuangan akhir tinja antar kabupaten. Bila rumah tangga di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan

Kota Yogyakarta, lebih dari 90 persen menggunakan tempat pembuangan akhir tinja tangka septik/IPAL, tidak demikian untuk 2 kabupaten lainnya. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, rumah tangga yang menggunakan tangki septik/IPAL baru mencapai 75,55 persen dan 82,57 persen. Artinya masih terdapat 24,45 persen rumah tangga di Kabupaten Kulonprogo dan 17,43 persen rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul yang menggunakan selain tangki septik.

Selain menurut kabupaten/kota, adanya ketimpangan penggunaan tempat pembuangan akhir tinja septi tang/IPAL tahun 2018 antar status ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan status ekonomi terendah(kuintil 1) merupakan rumah tangga dengan capaian terendah yakni 84,01 persen. Artinya dari 100 rumah tangga dengan pengeluaran di kuintil 1, baru 84 rumah tangga yang mengakses septi tang/IPAL. Dengan kata lain masih terdapat 15,99 persen rumah tangga di kuintil 1 yang masih menggunakan tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah, dan kolam/pantai/tanah lapang/kebun. Kondisi berbeda signifikan jelas terlihat pada rumah tangga kelas atas. Persentase rumah tangga dengan status ekonomi teratas(kuintil 5) sudah mencapai 98,71 persen.

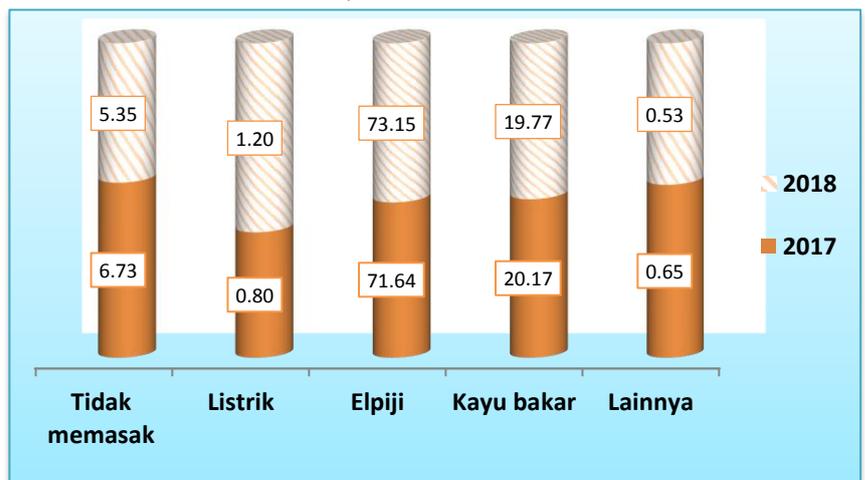
Masih rendahnya pemanfaatan tempat pembuangan akhir tinja yang menurut standar kesehatan ini adalah persoalan mendasar prioritas pembangunan saat ini. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan tercapainya 100 persen akses air minum aman, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak atau dikenal sebagai Program 100-0-100 (BPS:2018). Oleh karena itu, sosialisasi dan pembangunan tempat buang air besar yang sesuai dengan standar kesehatan perlu ditingkatkan dengan priortas rumah tangga dengan untuk pencegahan kemungkinan penularan penyakit menular.

3.3.4. Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Menurut Blum salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti kondisi rumah turut peran dalam penyebaran penyakit. Dengan demikian, untuk mewujudkan rumah yang sehat sebagai tempat tinggal, beristirahat seharusnya memenuhi kondisi lingkungan yang dapat menumbuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, jasmani maupun rohani.

Dalam upaya pencegahan penyakit menular, di dalam rumah diperlukan udara yang segar dengan pergantian udara ruangan yang sudah terpakai suhu dan kelembaban yang cukup di dalam rumah merupakan kebutuhan kesehatan manusia (Depkes, 1989). Akan tetapi, pada rumah sehat sering dijumpai pencemaran udara tanpa disadari oleh penghuninya, seperti pencemaran akibat bahan bakar untuk memasak. Dengan kata lain kualitas udara dalam rumah juga dipengaruhi oleh aktivitas rumah tangga seperti akibat penggunaan bahan bakar untuk memasak.

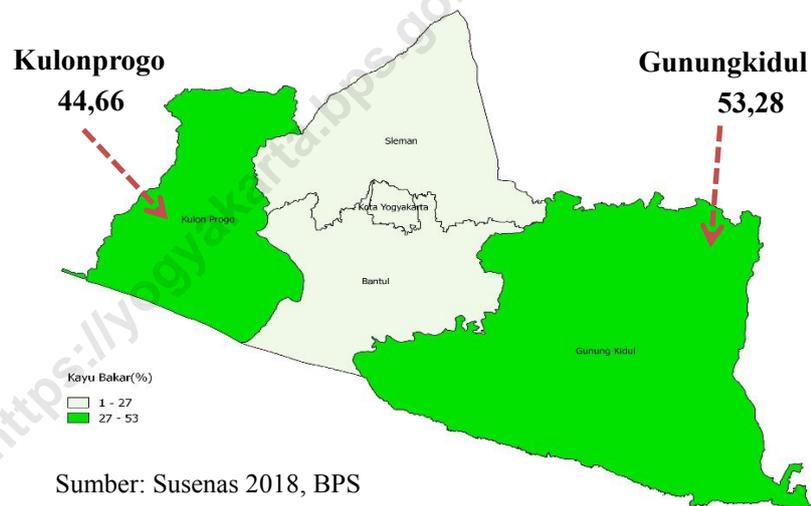
Gambar 3.12.
Presentase rumah tangga menurut Bahan bakar untuk Memasak, tahun 2017-2018.



Sumber: Susenas 2017-2018, BPS

Gambar 3.12 memperlihatkan sebagian besar rumah tangga di D.I. Yogyakarta menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar memasak pada dua tahun terakhir ini dan angkanya cenderung meningkat. Pada tahun 2018 tercatat 73,15 persen atau meningkat 1,51 persen poin. Sebaliknya penggunaan kayu bakar untuk memasak menurun dari 20,17 persen menjadi 19,77 persen pada tahun 2018. Hasil ini mengindikasikan bahwa program pemerintah dan sosialisasi ke masyarakat agar beralih ke bahan bakar yang lebih aman yaitu gas elpiji mulai berjalan sesuai rencana.

Gambar 3.13.
Presentase rumah tangga menurut Bahan bakar untuk Memasak Kayu Bakar, tahun 2018.



Bahan bakar kayu bakar masih digunakan oleh 53,28 persen rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul.

Menurut kabupaten/kota, Gunungkidul merupakan kabupaten dengan presentase terendah dalam penggunaan elpiji sebesar 45,98 persen bersanding dengan Kabupaten Kulonprogo yakni 54,63 persen. Masih rendahnya kepedulian rumah tangga dalam beralih ke bahan bakar gas elpiji karena mereka masih memilih memakai kayu bakar, masing-masing mencapai 44,66 persen rumah tangga di Kabupaten Kulonprogo dan 53,28 persen di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disinyalir bahwa kayu bakar mudah diperoleh bahkan tidak harus dengan membeli. Selain itu, ketakutan menggunakan kompor gas dan kurangnya sosialisasi keamanan penggunaan

elptji bagi rumah tangga di kedua wilayah tersebut menjadi alasan berikutnya.

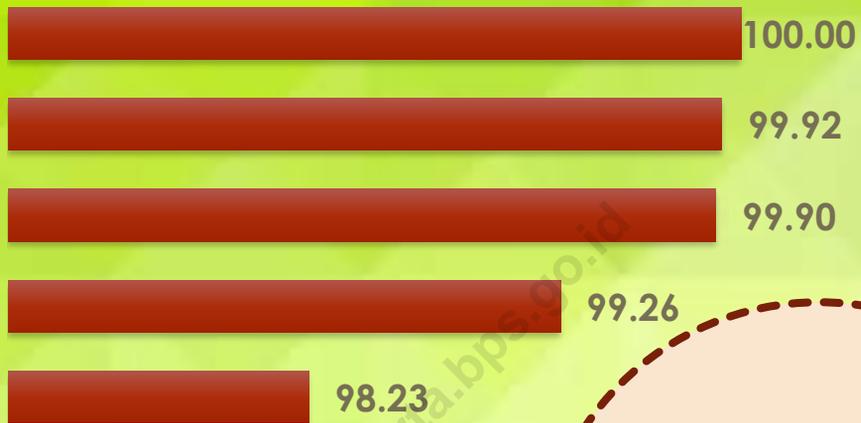
Selanjutnya, bila ditinjau menurut status ekonomi rumah tangga, presentase rumah tangga pada status ekonomi terendah(kuintil 1) yang menggunakan kayu bakar masih sebanyak 44,71 persen, namun pada status ekonomi tertinggi(kuintil 5) hanya sebesar 1,15 persen. Sedangkan menurut tingkat pendidikan kepala rumah tangga, sebanyak 38,40 persen rumahtangga dengan pendidikan KRT SD kebawah masih mengkonsumsi kayu bakar dan rumah tangga dengan pendidikan KRT SMA keatas hanya 4,57 persen.

Gambaran ini mengindikasikan bahwa terdapat disparitas yang cukup lebar penggunaan kayu bakar menurut status ekonomi dan pendidikan KRT. Ini sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk lebih mensosialisasikan bahan bakar memasak yang aman. Menurut penelitian, bahan bakar biomasa seperti kayu bakar dapat mengeluarkan polutan yang dapat bertahan dalam rumah dalam waktu cukup lama. Bila ini terus berlanjut maka, akan menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran udara akhirnya berakibat merebaknya beberapa penyakit seperti iritasi mata, iritasi hidung dan tenggorokan, serta sakit kepala, mual dan lain-lain (Depkes 2011).



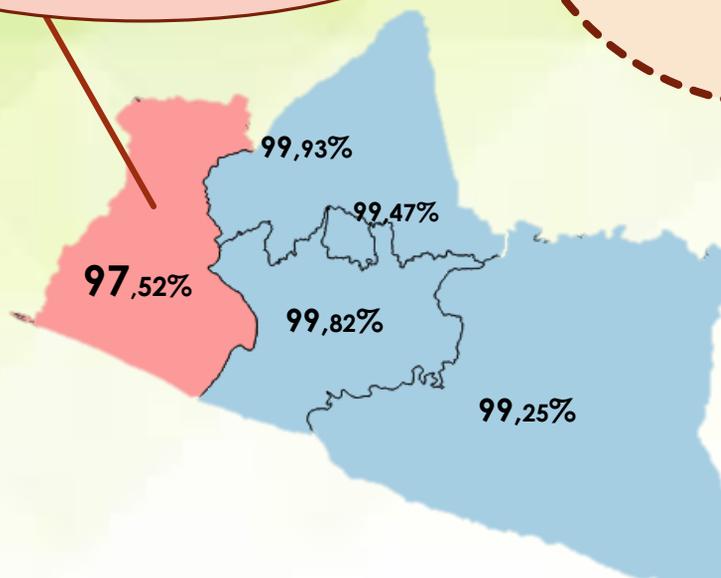
Kondisi Umum Perumahan 2018

20% Pengeluaran tertinggi

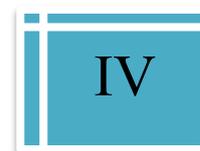


20% Pengeluaran terendah

Presentase ruta menempati rumah layak huni terendah



Rumah Layak huni **belum** terjangkau di seluruh lapisan masyarakat



Pembangunan perumahan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan dan permukiman menyebutkan bahwa rumah selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam/cuaca dan makhluk lainnya, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukimannya.

Sementara di tingkat internasional, seluruh negara-negara yang tergabung dalam PBB sepakat menetapkan target pembangunan perumahan yang termuat dalam SDG's. Sanitasi, ketersediaan air layak dan mewujudkan pembangunan menjadi perhatian bagi negara-negara tersebut. Beberapa indikator perumahan yang ingin dicapai tahun 2030 adalah terwujudnya akses perumahan layak bagi semua, aman dan terjangkau akses layanan infrastruktur dasar, penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan, layanan ruang publik yang memadai pengelolaan urbanisasi sebagai bagian dari perencanaan permukiman perkotaan.

Menyikapi dengan keseriusan kesepakatan negara-negara tersebut, Indonesia telah merumuskan beberapa rencana pembangunan perumahan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satunya, pemerintah menargetkan tercapainya 100 persen akses air minum aman, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak atau dikenal sebagai Program 100-0-100. Ini diwujudkan dengan penetapan kebijakan perumahan ditujukan untuk meningkatkan akses MBR agar dapat

memperoleh hunian layak dan terjangkau dan diprioritaskan untuk meningkatkan standar hidup layak penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Secara nyata, peluncuran program ketersediaan rumah layak bagi semua seperti Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Ini adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia sekaligus mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Sementara bagi penduduk miskin dengan rumah tidak layak akan menjadi sasaran program pemerintah pusat berupa Program bantuan stimulant perumahan Swadaya (BSPS).

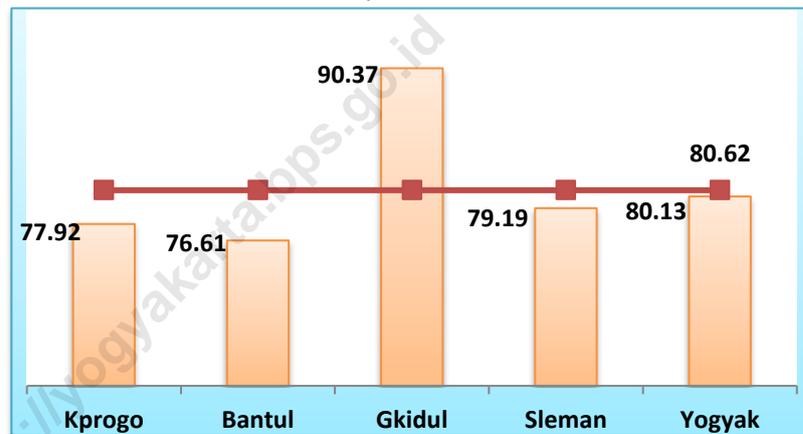
Seberapa jauh capaian program pembangunan perumahan memerlukan indikator sebagai ukuran keberhasilan program, evaluasi serta untuk memetakan kebijakan pembangunan periode berikutnya. Susenas menyediakan ukuran pembangunan perumahan seperti persentase rumah layak huni, rumah kumuh, sanitasi layak dan air minum layak. Data-data tersebut setidaknya mampu menunjukkan karakteristik rumah tangga seperti apa yang menjadi prioritas pembangunan perumahan.

4.1. Akses Air Minum Layak

Ketersediaan air minum yang layak dikonsumsi tak dapat dipandang remeh. Air yang tercemar disinyalir dapat menjadi sumber penularan penyakit. Krieger dan Higgins

mengungkapkan bahwa salah satu ciri rumah yang sehat adalah tersedia air bersih. Beberapa penelitian juga menghubungkan ketersediaan air bersih mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebesar 50% di negara berkembang. Bahkan, penggunaan fasilitas air yang memenuhi syarat kesehatan merupakan sarana pencegahan, pengurangan atau menghilangkan resiko terjadinya penularan penyakit melalui air (Soedjadi K,2007).

Gambar 4.1.
Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak, 2018



Sumber: Susenas 2018, BPS

Gambar 4.1 menampilkan presentase rumah tangga menurut akses air minum layak. Presentase rumah tangga dengan akses air minum layak tahun 2018 mencapai 80,62 persen. Artinya masih ada 19,38 persen rumah tangga berakses air minum tidak layak. Rumah tangga tersebut tersebar di lima kabupaten/kota. Menurut kabupaten/kota, distribusi rumah tangga berakses air minum layak berkisar antara 70 persen hingga 90 persen. Akses air minum layak paling banyak terdapat di Kabupaten Gunungkidul sebesar 90,37 persen.

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul mendorong rumah tangga mayoritas mengkonsumsi air minum dari leding(34,57%), sumur/mata air terlindung(30,16%),

Sebanyak 80,62
persen rumah
tangga di D.I.
Yogyakarta telah
mengakses air
minum layak.

dan air hujan(19,54%). Selain itu, dengan luas wilayah terluas se D.I. Yogyakarta dengan kepadatan penduduk terendah, ketersediaan tanah masih cukup untuk pembangunan penampungan limbah yang jauh dari sumber air minum. Mayoritas rumah tangga menggunakan air minum dengan rumber air minum ke penampangan limbah lebih dari 10 m.

Tabel 4.1.
Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Air Minum Layak, 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Air Minum	
	Layak	Tidak Layak
(1)	(2)	(3)
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	80,66	19,34
Kuintil 2	80,48	19,52
Kuintil 3	73,04	26,96
Kuintil 4	74,24	25,76
Kuintil 5	80,53	19,47
Ijazah Tertinggi Kepala Rumah Tangga		
SD ke bawah	76,56	23,44
SMP atau sederajat	79,02	20,98
SMA keatas	84,34	15,66

Sumber: Susenas Maret 2017

Menurut tingkat ekonomi rumah tangga, terjadi kesenjangan yang cukup lebar. Pada rumah tangga di 20 persen terbawah dan 20 persen terbawah kedua memperlihatkan lebih dari 26 persen diantaranya mengakses air minum tidak layak. Sebaliknya rumah tangga yang masuk pada kuintil 5 hanya

7,72 persen menggunakan air minum tidak layak. Angka-angka tersebut mengisyaratkan bahwa mereka yang berada di 40 persen ekonomi terbawah menjadi prioritas dalam menyediakan akses air minum layak. Hal ini diduga oleh ketidakmampuan rumah tangga kelas ekonomi terbawah dalam membangun sarana air minum layak yang tidak terkontaminasi dengan pembuangan limbah karena keterbatasan lahan dan biaya pembangunan akses air minum layak.

Disparitas akses air minum layak juga tampak terlihat untuk rumah tangga dengan KRT pendidik rendah (SD kebawah) dan SMA keatas. Lebih dari 23 persen rumah tangga dengan KRT berpendidikan SD kebawah masih menggunakan sumber air minum tidak layak, sementara rumah tangga dnegan KRT SLTA keatas sudah berkisar 15 persen. Jenjang pendidikan disinyalir berpengaruh terhadap pandangan kebutuhan sumber air minum yang sehat dan bersih seperti dalam hal pembangunan intalasi sumber air minum.

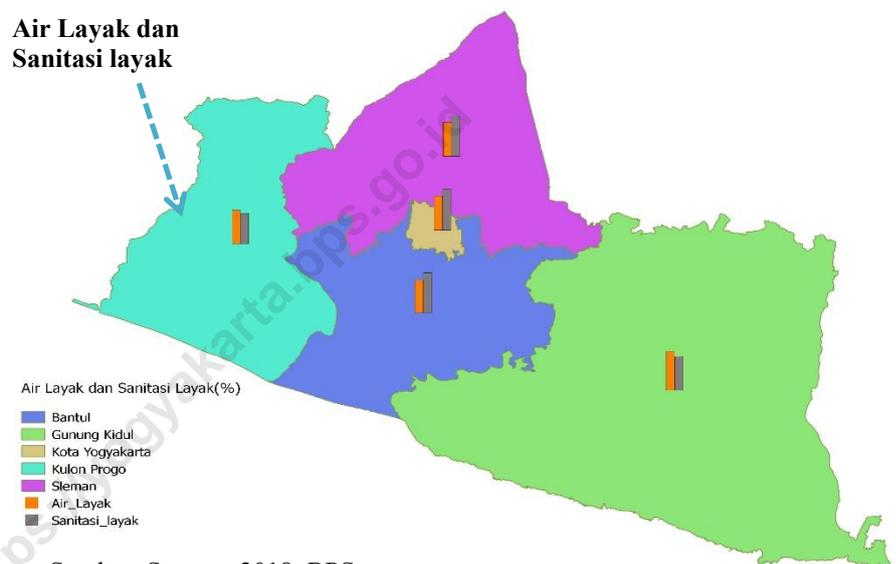
4.1.Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak merupakan sarana yang segera dipenuhi untuk tercapainya derajat kesehatan dalam rumah tangga. Tertuang pada target SGD's pada poin 6. Hanya tinggal 12 tahun lagi, negara-negara yang tergabung dalam PBB berpacu untuk pengentasan penduduk bebas akses sanitasi tidak layak.

Dalam upaya evaluasi dan monitoring pencapaian target tersebut, indikator sanitasi layak diukur melalui ketersediaan kloset leher angsa, tangki septik/sistem pengolahan air limbah (SPAL) dan yang digunakan oleh anggota rumah tangga sendiri atau bersama-sama dengan rumah tangga tertentu. Sanitasi layak ini akan meminimalkan penularan penyakit dari konsumsi air yang terkontaminasi kotoran manusia.

Gambar 4.2 menyajikan akses sanitasi yang digunakan rumah tangga. Secara umum sebagian rumah tangga telah menggunakan akses sanitasi layak. Pada tahun 2018, rumah tangga yang memanfaatkan akses sanitasi layak mencapai 88,92 persen. Artinya dari 100 rumah tangga, sekitar 11 rumah tangga yang masih mengakses sanitasi tidak layak.

Gambar 4.2.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Layak, 2018



Sumber: Susenas 2018, BPS

Bia ditinjau secara spasial, pada dasarnya mayoritas rumah tangga telah menyadari pentingnya rumah sehat. Ini ditandai dengan banyaknya rumah tangga berakses sanitasi layak. Sekitar 90 persen lebih rumah tangga di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta telah memakai sanitasi layak. Kondisi agak berbeda terjadi di dua kabupaten lainnya. Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo, persentase rumah tangga berakses sanitasi layak baru mencapai 79,12 persen dan 70,83 persen. Dengan kata lain, lebih dari seperlima jumlah rumah tangga di kedua kabupaten ini masih memakai akses sanitasi tidak layak. Lebih rinci, masih banyak rumah tangga di kedua kabupaten tersebut

Presentase rumah tangga yang mengakses sanitasi layak dan air minum layak di Kabupaten Kulonprogo adalah yang terendah

masih menggunakan pembuangan akhir tinja tidak layak. Pada tahun 2018, sebanyak 24,45 persen rumah tangga di Kabupaten Kulonprogo dan 17,43 persen rumah tangga Kabupaten Gunungkidul masih menggunakan pembuangan akhir tinja bukan tangki septik/spal seperti sungi, lubang tanah, tanah lapang/kebun.

Tabel 4.2.
Persentase Rumah tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Akses Terhadap Sanitasi, 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Sanitasi	
	Layak	Tidak Layak
(1)	(2)	(3)
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	77,36	22,64
Kuintil 2	85,21	14,79
Kuintil 3	89,23	10,77
Kuintil 4	94,65	5,35
Kuintil 5	98,13	1,87
Ijazah Tertinggi Kepala Rumah Tangga		
SD kebawah	83,19	16,81
SMP atau sederajat	86,74	13,26
SMA keatas	94,14	5,86

Sumber: Susenas Maret 2018, BPS

Menurut status ekonomi rumah tangga, tampak bahwa keberadaan akses sanitasi memberikan indikasi bahwa semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, presentase rumah tangga yang menggunakan akses sanitasi layak semakin besar. Selain itu, juga terjadi kesenjangan cukup lebar antar kelompok ekonomi. Proporsi terbesar pengguna sanitasi layak adalah

rumah tangga pada kelompok ekonomi teratas (kuintil 5). Sebaliknya rumah tangga berakses sanitasi tidak layak paling terbanyak adalah rumah tangga yang berada pada ekonomi terbawah (kuintil 1).

Pola yang hampir sama juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Pengetahuan dan kematangan berfikir kepala rumah tangga disinyalir mempengaruhi dalam pemilihan penggunaan sanitasi. Mereka yang berpendidikan SLTA keatas jauh lebih banyak memakai akses sanitasi layak (94,14 persen) daripada kepala rumah tangga ijazah SD kebawah (83,19 persen). Seperti yang terlihat pada penggunaan kloset. Rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpendidikan SD kebawah 4,14 persen diantaranya masih memakai jenis kloset cempung dan 7,77 persen juga masih buang air besar di MCK umum atau tidak ada fasilitas. Hal ini menandakan bahwa rumah tangga berpendidikan rendah masih minim tentang pengetahuan pentingnya sanitasi yang sehat dan upaya pengurangan resiko terinfeksi penyakit akibat tempat buang air besar tersebut.

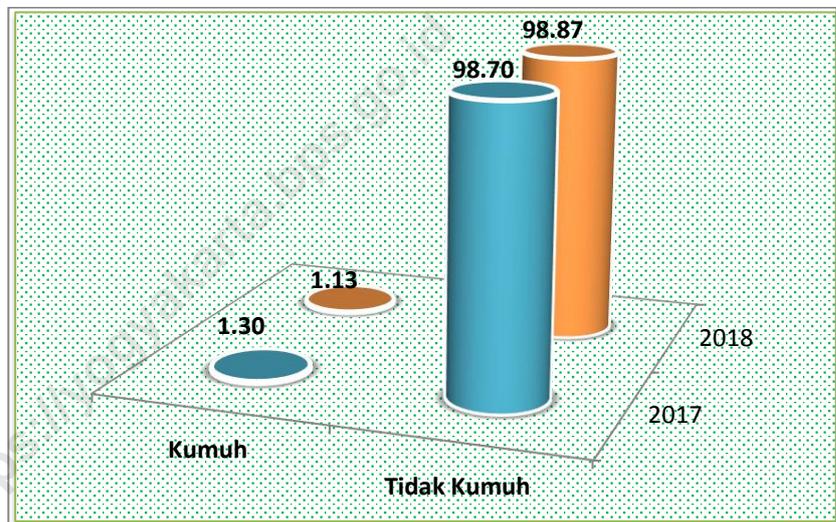
4.2. Rumah Tangga Kumuh

Target menciptakan wilayah bebas rumah rumuh merupakan program pembangunan perumahan berkelanjutan. Ini tercantum pada target SDG's oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Indikator capaian rumah tangga tidak kumuh lebih kompleks dari sisi kualitas bangunan atau sarana prasarana yang dimiliki. Rumah tangga kumuh atau rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah kumuh akan mempunyai resiko lebih tinggi terkena penyakit menular dan kecelakaan dalam rumah daripada mereka yang tinggal di rumah lebih baik (Keman, 2005).

Selanjutnya, kreteria rumah tangga kumuh adalah rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah dengan kondisi

berakses air minum tidak layak, sanitasi tidak layak, luas lantai perkapita 7,2 m² ke bawah, dan mempunyai skor *durability of housing* sebesar 2 ke atas. *Durability of housing* adalah daya tahan bangunan dengan kriteria jenis atap terluas ijuk/rumbia dan lainnya; jenis dinding terluas bambu dan lainnya; jenis lantai terluas tanah; dan dikatakan kumuh bila memenuhi 2 kriteria.

Gambar 4.3.
Persentase Rumah Tangga Bertempat Tinggal di Rumah Kumuh, 2017-2018



Sumber: Susenas Maret 2017-2018, BPS

Data series menunjukkan persentase rumah tangga kumuh selama dua tahun terakhir memberikan pola yang menurun setiap tahun. Tahun 2018, sebanyak 1,13 persen rumah tangga bertempat tinggal di rumah kumuh dan menurun 0,17 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut spacial rumah tangga kumuh paling banyak ditemui di Kota Yogyakarta. Masalah yang dihadapi pembangunan perumahan di perkotaan adalah luas lahan yang semakin menyempit, harga tanah dan material bangunan yang sewaktu-waktu bertambah mahal serta kebutuhan masyarakat

yang semakin meningkat (*Soedjajadi Keman, 2005*). Disisi lain, sebagai kota pelajar, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian D.I. Yogyakarta, migrasi penduduk ke wilayah ini semakin tinggi sehingga kebutuhan rumah jucu ikut meningkat. Kenyataan ini dapat dilihat dari presentase rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas perkapita kurang dari 7,2 m² masih mencapai 12,26 persen, jauh lebih tinggi daripada 4 kabupaten/kota lainnya.

Tabel 4.3.
Persentase Rumah tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Rumah Kumuh, 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Kreteria Rumah	
	Tidak Kumuh	Kumuh
(1)	(2)	(3)
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	97,78	2,22
Kuintil 2	98,40	1,60
Kuintil 3	99,53	0,47
Kuintil 4	99,14	0,86
Kuintil 5	99,52	0,48
Ijazah Tertinggi Kepala Rumah Tangga		
SD kebawah	99,12	0,88
SMP atau sederajat	98,05	1,95
SMA keatas	98,93	1,07

Sumber: Susenas Maret 2018, BPS

Disparitas cukup lebar antar status ekonomi terbawah dan tertinggi dalam menempati rumah tidak kumuh.

Tabel 4.3. menyajikan akses rumah kumuh dan karakteristik rumah tangga. Menurut kuitil pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan dari pendapatan, terlihat bahwa mereka yang tinggal di rumah kumuh adalah yang masuk kategori 20 persen rumahtangga pengeluaran terendah. Kondisi yang berbeda tampak pada kelas ekonomi tertinggi (kuintil 5). Semua rumah tangga di kelompok ini telah menempati rumah

tidak kumuh. Dengan kata lain, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi ketimpangan kelas ekonomi terendah dan tertinggi terlihat begitu lebar dalam hal bertempat tinggal di rumah tidak kumuh.

Ini berarti, kualitas dan kuantitas rumah sangat erat hubungannya dengan penghasilan atau pendapatan rumah tangga. Keterbatasan luas lahan yang dimiliki berdampak tingkat kepadatan penghuni semakin tinggi. Ditambah ketidakmampuan rumah tangga dengan pendapatan rendah dalam membangun rumah yang berkualitas berakibat kualitas bangunan rendah, sanitasi dasar perumahan yang rendah sehingga tidak tersedia air minum yang tidak layak, kondisi rumah yang sangat menyedihkan dan banyaknya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk dan tikut (Soedjajadi Keman, 2005).

Bila ditinjau menurut tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan kualitas tempat tinggal, rupanya tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung berpengaruh terhadap kualitas rumah yang ditempati. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung semakin meningkat presentase rumah tangga yang menempati rumah tidak kumuh. Meskipun ketimpangan tidak sebesar yang ditunjukkan oleh status ekonomi, ketimpangan presentase penghuni rumah kumuh juga terjadi jika dilihat menurut tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Presentase rumah tangga dengan pendidikan KRT berijazah SD kebawah menempati rumah kumuh sekitar 2 kali lipat daripada yang berpendidikan SLTP/ sederajat. Sementara KRT berijazah SLTA sedikit lebih rendah dari yang berijazah SLTP.

Lokasi rumah yang dekat dengan tempat kerja, merupakan salah satu faktor pemilihan rumah bagi masyarakat pendidikan menengah keatas yang bekerja. Tentunya, faktor harga tanah, rumah atau sewa/kontrak rumah sehingga mereka

menempati rumah dengan luas lantai sesuai dengan kemampuan ekonomi. Tercatat 95,63 persen rumah tangga dengan pendidikan KRT SLTA keatas yang telah menempati rumah dengan luas lantai perkapita lebih dari 7,2 m². Lebih sedikit dari KRT dengan pendidikan SLTP/ sederajat. Dan ini adalah salah satu kreteria rumah kumuh.

4.4. Rumah Layak Huni

Pemenuhan rumah layak huni bagi semua merupakan agenda pemerintah seperti yang termuat dalam undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Oleh karena itu pemerintah melalui pembangunan perumahan berupaya untuk mendukung terwujudkan pemenuhan kebutuhan dna kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya kreteria penentuan rumah layak huni hampir sama dengan rumah tidak kumuh. Perbedaan hanya pada penambahan kreterian kualitas bangunan pada indikator rumah tangga kumuh sementara rumah layak huni juga mensyaratkan sumber penerangan listrik.

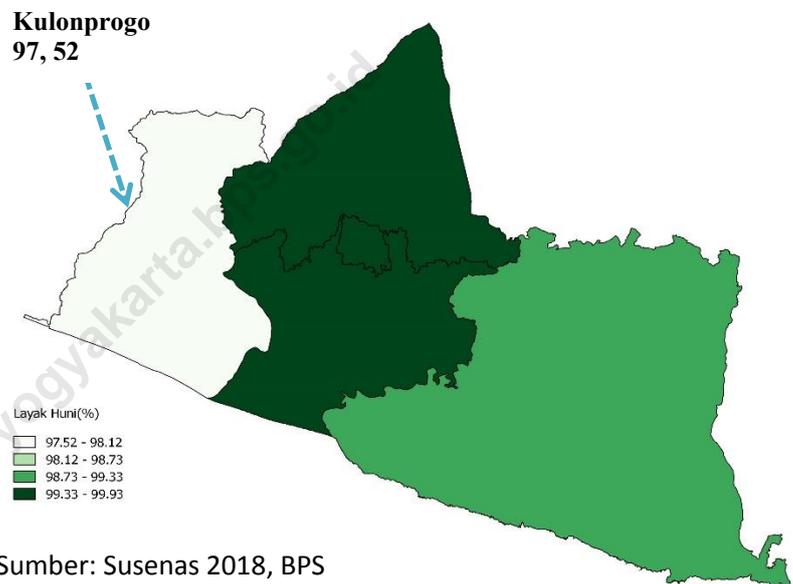
Tabel 4.4.
Persentase Rumah tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Rumah Layak Huni, 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Kreteria Rumah Layak	
	Layak Huni	Tidak Layak Huni
(1)	(2)	(3)
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	98,23	1,77
Kuintil 2	99,26	0,74
Kuintil 3	99,90	0,10
Kuintil 4	99,92	0,08
Kuintil 5	100,00	0,00
Ijazah Tertinggi Kepala Rumah Tangga		
SD kebawah	99,03	0,97
SMP atau sederajat	99,31	0,69
SMA keatas	99,85	0,15

Sumber: Susenas Maret 2018, BPS

Ditinjau dari kriteria rumah layak huni, secara umum hampir semua rumah tangga telah menempati rumah layak huni. Akan tetapi sekitar 0,54 persen diantaranya masih bertempat tinggal di rumah tidak layak huni. Hal ini memberikan gambaran bahwa hampir seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota dengan berbagai jenjang ekonomi maupun tingkat pendidikan mayoritas telah hidup nyaman dan layak dilihat dari sisi kelayakan rumah yang dihuni.

Gambar 4.4.
Persentase Rumah tangga menurut Rumah Layak Huni, 2018



Presentase rumah tangga di Kabupaten Kulonprogo yang menempati rumah layak huni baru sebesar 97,52.

Walaupun demikian, perhatian pembangunan perumahan tetap menjadi prioritas terutama untuk rumah tangga yang masih belum mampu menikmati rumah layak, meski hanya sebagian kecil. Seperti rumah tangga pada kelompok 20 persen pengeluaran terendah. sebanyak 1,77 persen rumah tangga diantaranya belum menikmati rumah layak huni. Perbaikan perumahan untuk status ekonomi rendah ini dapat dilihat dari sisi kelayakan sanitasi, sumber air minum atau lantainisasi. Faktor pendapatan rumah tangga, sehingga mereka tidak mampu untuk membangun sarana perumahan yang sesuai dengan syarat rumah layak huni. Pendapatan lebih

diutamakan untuk mencukupi kebutuhan pokok daripada untuk penyediaan fasilitas rumah yang layak.

Sementara untuk penyediaan fasilitas rumah berupa sumber penerangan yang digunakan, mayoritas telah menggunakan PLN. Kemudian berkaitan perluasan luas lantai perkapita yang belum memenuhi persyaratan rumah layak huni, ini merupakan program jangka panjang. Hal ini terkait luas lahan yang dimiliki rumah tangga.

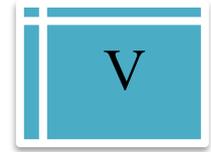
<https://yogyakarta.bps.go.id>

PENUTUP

KESIMPULAN



Gambar Vektor oleh:
Flaticon-www.Flaticon.com



Penyajian data series perumahan dari hasil pendataan Susenas memperlihatkan bahwa secara umum potret perumahan D.I. Yogyakarta menunjukkan perbaikan. Namun, demikian, penambahan rumah tangga setiap tahun menuntut pemerintah untuk tetap focus pada pemenuhan ketersediaan rumah yang layak bagi setiap penduduk. Capaian pembangunan perumahan selama tahun 2018, dapat sebagai indikator sebagai awal evaluasi, monitoring hingga menentukan perencanaan pembangunan perumahan. Berikut adalah sekilas gambaran kondisi perumahan D.I. Yogyakarta sepanjang tahun 2018.

1. Data Susenas 2018 menyajikan data kepemilikan bangunan tempat tinggal. Tercatat sebesar 76,54 persen rumah tangga telah menempati rumah milik sendiri. Artinya masih terdapat 23,46 persen rumah tangga lainnya menempati rumah dengan sistem sewa/kontrak, bebas sewa atau dinas.
2. Persentase rumah tangga yang menempati luas lantai perkapita lebih dari 7,2 m² adalah sebesar 96,19 persen rumah tangga. Dengan kata lain, lebih dari 96 persen rumah tangga di D.I.Yogyakarta telah menempati rumah dengan kriteria sehat.
3. Potret kualitas fisik bangunan tempat tinggal pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Sebanyak 96,96 persen rumah tangga telah berlantaikan bukan tanah. Namun demikian, 8,64 persen rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul masih berlantaikan tanah. Dilain pihak. Kabupaten Kulonprogo berhasil menurunkan penggunaan

lantai bukan tanah sebesar 3,37 persen poin.

- 3.2. Mayoritas rumah tangga telah menggunakan genteng sebagai atap, hanya sebagian kecil saja yang menggunakan selain genteng yaitu sebesar 3,85 persen.
 - 3.3. Presentase rumah tangga menggunakan dinding tembok pada tahun 2018 meningkat 0,69 persen poin. Akan tetapi penggunaan kayu atau lainnya masih ditemukan di Kabupaten Kulonprogo(13,18%) dan Kabupaten Gunungkidul(15,35%).
4. Kondisi tempat tinggal menurut keberadaan fasilitas tempat tinggal adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Hingga tahun 2018, sebagian besar rumah tangga telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan yaitu mencapai 99,92 persen. Meski demikian masih dijumpai 0,08 persen rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik.
 - 4.2. Kualitas air minum yang memperlihatkan lebih dari separuh rumah tangga telah membangun lokasi air minum jauh dari tempat penampungan air limbah. Sebesar 72,55 persen lokasi sumber air minum telah berjarak lebih 10 m.
 - 4.3. Penggunaan tempat buat air besar masih bervariasi. Sebanyak 3,47 persen rumah tangga belum menggunakan tempat buang air besar sendiri/bersama. Di lain pihak, 80,58 persen rumah tangga di D.I. Yogyakarta menyatakan telah menggunakan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri.

- 4.4. Terdapat 97,88 persen rumah tangga telah menggunakan kloset leher angsa sedangkan sisanya menggunakan jenis plengsengan, cemplung/cubluk, dan termasuk didalamnya rumah tangga yang tidak menggunakan kloset.
- 4.5. Sebanyak 15,99 persen rumah tangga pada kuintil 1 dan 10,77 persen di kuintil 2 masih menggunakan tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah, kolam/pantai/tanah lapang/kebun atau lainnya
- 4.6. Penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak menurut 0,40 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kayu bakar masih banyak digunakan di Kabupaten Kulonprogo(44,66%) dan Kabupaten Gunungkidul(53,28%). Di sisi lain, penggunaan elpiji meningkat dari 71,64 persen pada tahun 2017 menjadi 73,15 persen.

5. Indikator Perumahan

- 5.1. Lebih dari 80 persen rumah tangga D.I. Yogyakarta pada tahun 2018 telah mengkonsumsi air minum layak. Dengan demikian sekitar seperlima rumah tangga masih berakses air minum tidak layak.
- 5.2. Akses sanitasi layak telah dinikmati oleh 88,92 persen rumah tangga. Menurut kabupaten/kota, lebih dari 93 persen rumah tangga di 3 di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta telah memakai sanitasi layak. Sementara dua kabupaten lainnya akses sanitasi layak baru menjangkau sekitar 70 persen rumah tangga.
- 5.3. Selama tiga tahun terakhir, persentase rumah tangga menempati rumah kumuh memberikan pola yang menurun setiap tahun. Tahun 2016, sebanyak 1,67

persen rumah tangga bertempat tinggal di rumah kumuh. Jumlah ini terus menurun setiap tahun hingga pada tahun 2018 hanya tercatat 1,13 persen.

- 5.4. Secara umum hampir semua rumah tangga telah menempati rumah layak huni. Kurang lebih 0,54 persen diantaranya masih bertempat tinggal di rumah tidak layak huni. Disparitas terlihat jelas bila ditinjau menurut status ekonomi. Presentase rumah tangga dengan pengeluaran perkapita 20 persen terbawah yang bertempat tinggal pada rumah tidak layak huni mencapai 1,77 persen. Sementara semua rumah tangga pada kelompok 20 persen teratas sudah menempati rumah layak huni.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1.**Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Status Kepemilikan Rumah			
	Milik Sendiri	Kontrak/sewa	Bebas Sewa	Lainya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	90,40	0,82	8,15	0,63
Bantul	78,83	10,41	10,76	0,00
Gunungkidul	94,71	0,70	4,10	0,49
Sleman	73,98	19,59	5,77	0,66
Yogyakarta	39,93	35,84	21,20	3,03
D.I. Yogyakarta	76,54	13,71	8,99	0,75

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 2.**Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan Karakteristik Rumah Tangga di D.I. Yogyakarta, 2017**

Karakteristik Rumah Tangga	Status Kepemilikan Rumah			
	Milik Sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas Sewa	Lainnya
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Tipe Daerah				
Perkotaan	70,09	18,61	10,37	0,94
Perdesaan	94,57	0,04	5,14	0,24
Total	76,54	13,71	8,99	0,75
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga				
Laki-laki	79,04	10,75	9,30	0,91
Perempuan	66,31	25,86	7,72	0,11
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga				
Kuintil 1	85,58	2,51	11,79	0,12
Kuintil 2	84,56	6,50	8,78	0,17
Kuintil 3	82,88	7,18	9,67	0,27
Kuintil 4	76,86	13,89	7,78	1,46
Kuintil 5	52,82	38,49	6,94	1,75
Pendidikan Kepala Rumah Tangga				
SD kebawah	89,98	3,53	6,26	0,24
SMP atau sederajat	77,79	11,83	10,05	0,33
SMA keatas	65,49	22,38	10,83	1,29

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 3.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Luas Lantai Perkapita Tempat Tinggal di D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita		
	<= 7,2	7,3-9,9	10+
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Kulonprogo	0,81	2,44	96,75
Bantul	4,79	6,98	88,23
Gunungkidul	0,47	1,65	97,88
Sleman	2,56	6,95	90,49
Yogyakarta	12,26	16,97	70,77
D.I. Yogyakarta	3,81	6,77	89,42

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 4.

Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Perkapita Tempat Tinggal dan Karakteristik Rumah Tangga di D.I. Yogyakarta, 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Luas Lantai Perkapita		
	<= 7,2	7,3-9,9	10+
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	5,07	8,59	86,35
Perdesaan	0,31	1,68	98,02
Total	3,81	6,77	89,42
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga			
Laki-laki	3,62	5,86	90,52
Perempuan	4,60	10,48	84,91
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga			
Kuintil 1	4,74	6,70	88,57
Kuintil 2	5,70	6,42	87,88
Kuintil 3	2,08	2,63	95,29
Kuintil 4	2,55	6,12	91,33
Kuintil 5	3,99	11,96	84,05
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
SD atau kebawah	2,72	4,14	93,14
SMP atau sederajat	4,82	6,09	89,09
SMA keatas	4,37	9,06	86,58

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 5.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Jenis Atap Terluas di
D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Jenis Atap Terluas			
	Beton	Genteng	Asbes	Seng/lainnya
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Kulonprogo	0,69	98,21	0,72	0,37
Bantul	1,22	95,25	1,97	1,56
Gunungkidul	0,14	97,82	2,03	0,01
Sleman	0,41	95,88	3,11	0,60
Yogyakarta	0,26	89,99	6,01	3,73
D.I. Yogyakarta	0,58	95,57	2,73	1,12

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 6.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Jenis Atap Terluas di
D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Jenis Atap Terluas			
	Beton	Genteng	Asbes	Seng/lainnya
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Tipe Daerah				
Perkotaan	0,66	94,78	3,19	1,37
Perdesaan	0,37	97,77	1,45	0,41
Total	0,58	95,57	2,73	1,12
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga				
Laki-laki	0,50	96,11	2,21	1,17
Perempuan	0,92	93,36	4,83	0,89
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga				
Kuintil 1	0,52	95,28	2,86	1,34
Kuintil 2	0,71	95,25	2,86	1,18
Kuintil 3	0,08	96,30	2,29	1,33
Kuintil 4	0,70	94,90	3,55	0,85
Kuintil 5	0,91	96,12	2,08	0,88
Pendidikan Kepala Rumah Tangga				
SD atau kebawah	0,16	96,18	2,65	1,02
SMP atau sederajat	0,58	95,03	3,19	1,21
SMA keatas	0,92	95,26	2,65	1,17

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 7.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Jenis Dinding Terluas di D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Jenis Dinding Terluas		
	Tembok	Kayu/papan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	86,82	6,44	6,74
Bantul	98,40	0,62	0,97
Gunungkidul	84,65	7,51	7,84
Sleman	99,23	0,42	0,35
Yogyakarta	97,23	1,90	0,87
D.I. Yogyakarta	94,70	2,64	2,67

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 8.**Persentase Rumah Tangga Jenis Dinding Terluas dan Karakteristik Rumah Tangga di D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Jenis Dinding Terluas		
	Tembok	Kayu/papan	Lainnya
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tipe Daerah			
Perkotaan	97,88	0,99	1,12
Perdesaan	85,80	7,22	6,98
Total	94,70	2,64	2,67
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga			
Laki-laki	94,87	2,49	2,64
Perempuan	93,98	3,22	2,79
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga			
Kuintil 1	86,34	6,59	7,07
Kuintil 2	93,57	2,96	3,46
Kuintil 3	95,98	2,33	1,68
Kuintil 4	97,84	1,19	0,96
Kuintil 5	99,75	0,10	0,15
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
SD atau kebawah	90,40	4,64	4,96
SMP atau sederajat	94,77	2,44	2,79
SMA keatas	98,08	1,11	0,81

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 9.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Kategori Jenis Lantai Terluas di D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Kategori Jenis Lantai Terluas	
	Bukan Tanah	Tanah
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Kulonprogo	92,56	7,44
Bantul	98,95	1,05
Gunungkidul	91,36	8,64
Sleman	98,98	1,02
Yogyakarta	99,79	0,21
D.I. Yogyakarta	96,96	3,04

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 10.**Persentase Rumah Tangga Jenis Lantai Terluas dan Karakteristik Rumah Tangga di D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Kategori Jenis Lantai Terluas	
	Bukan Tanah	Tanah
(1)	(2)	(3)
Tipe Daerah		
Perkotaan	98,95	1,05
Perdesaan	91,39	8,61
Total	96,96	3,04
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		
Laki-laki	97,22	2,78
Perempuan	95,88	4,12
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	91,82	8,18
Kuintil 2	96,20	3,80
Kuintil 3	98,28	1,72
Kuintil 4	98,75	1,25
Kuintil 5	99,76	0,24
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
SD atau kebawah	93,88	6,12
SMP atau sederajat	96,35	3,65
SMA keatas	99,60	0,40

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 11.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Bagaimana Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/ kota	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar		
	Digunakan hanya ART sendiri	Digunakan bersama ART Ruta lain	Lainnya
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Kulonprogo	84,92	8,84	6,24
Bantul	80,35	15,64	4,01
Gunungkidul	87,59	8,50	3,91
Sleman	83,30	14,32	2,38
Yogyakarta	60,44	37,40	2,16
D.I. Yogyakarta	80,58	15,95	3,47

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 12.**Persentase Rumah Tangga Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Karakteristik Rumah Tangga di D.I. Yogyakarta, 2018**

Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
Kabupaten/kota	Digunakan hanya ART sendiri	Digunakan bersama ART Ruta lain	Lainnya
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tipe Daerah			
Perkotaan	78,26	18,80	2,94
Perdesaan	87,07	7,99	4,94
Total	80,58	15,95	3,47
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga			
Laki-laki	82,99	13,78	3,23
Perempuan	70,68	24,85	4,47
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga			
Kuintil 1	78,24	13,99	7,77
Kuintil 2	81,49	14,11	4,40
Kuintil 3	87,85	8,92	3,23
Kuintil 4	83,78	14,85	1,37
Kuintil 5	71,54	27,88	0,58
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
SD atau kebawah	83,57	11,52	4,91
SMP atau sederajat	78,43	16,88	4,70
SMA keatas	78,88	19,18	1,94

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 13.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kloset di****D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Jenis Kloset		
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/ Cubluk
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	93,96	0,87	5,16
Bantul	99,27	0,10	0,63
Gunungkidul	93,05	0,42	6,52
Sleman	99,99	0,00	0,01
Yogyakarta	100,00	0,00	0,00
D.I. Yogyakarta	97,88	0,19	1,92

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 14.**Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Jenis Kloset di D.I. Yogyakarta, 2018**

Karakteristik Rumah Tangga	Jenis Kloset		
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/ Cubluk
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tipe Daerah			
Perkotaan	99,54	0,03	0,43
Perdesaan	93,17	0,65	6,18
Total	97,88	0,19	1,92
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga			
Laki-laki	97,94	0,22	1,84
Perempuan	97,63	0,10	2,27
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga			
Kuintil 1	94,19	0,68	5,13
Kuintil 2	97,52	0,20	2,28
Kuintil 3	97,82	0,00	2,18
Kuintil 4	99,62	0,12	0,26
Kuintil 5	100,00	0,00	0,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
SD atau kebawah	95,51	0,35	4,14
SMP atau sederajat	97,79	0,34	1,88
SMA keatas	99,74	0,03	0,23

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 15.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/ kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja				
	Tangki septik	IPAL	Kolam/sawah/ sungai/danau/ laut	Lubang tanah	Lainnya
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	73,44	2,11	0,25	23,72	0,48
Bantul	93,15	4,04	1,59	1,08	0,14
Gunungkidul	82,05	0,52	0,28	16,38	0,77
Sleman	94,84	1,97	3,18	0,01	0,00
Yogyakarta	65,60	32,05	2,35	0,00	0,00
D.I. Yogyakarta	86,03	6,16	1,81	5,77	0,23

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 16.**Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Karakteristik Rumah Tangga di D.I. Yogyakarta, 2018**

Karakteristik Rumah Tangga	Tempat Pembuangan Akhir Tinja			
	Tangki septik	IPAL	Kolam/sawah/ sungai/danau/ laut	Lubang tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tipe Daerah				
Perkotaan	88,02	8,29	2,30	1,34
Perdesaan	80,35	0,08	0,41	18,40
Total	86,03	6,16	1,81	5,77
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga				
Laki-laki	86,69	5,36	1,91	5,81
Perempuan	83,28	9,48	1,41	5,64
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga				
Kuintil 1	80,22	3,79	12,57	3,41
Kuintil 2	84,30	4,93	9,12	1,65
Kuintil 3	87,33	4,88	5,06	2,74
Kuintil 4	88,95	7,14	2,08	1,83
Kuintil 5	88,89	9,81	0,60	0,69
Pendidikan Kepala Rumah Tangga				
SD kebawah	83,69	3,92	1,81	10,19
SMP atau sederajat	86,61	4,57	1,75	6,74
SMA keatas	87,65	8,36	1,83	2,08

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 17.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Sumber Air Minum di****D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/ kota	Sumber Air Minum					
	Air kemasan/ isi ulang	Leding	Sumur bor/po mpa	Sumur/mata air terlindung	Sumur/mata air tak terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	12,80	18,70	7,90	47,32	13,11	0,17
Bantul	23,06	6,26	24,96	41,67	4,06	0,00
Gunungkidul	7,80	34,57	2,32	30,16	5,62	19,54
Sleman	32,86	4,97	12,45	44,45	5,25	0,01
Yogyakarta	46,69	8,92	23,52	20,09	0,77	0,00
D.I Yogyakarta	25,20	12,87	14,77	38,18	5,25	3,73

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 18.**Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Karakteristik Rumah Tangga di D.I. Yogyakarta, 2018**

Karakteristik Rumah Tangga	Sumber Air Minum					
	Air kemasan/ isi ulang	Leding	Sumur bor/ pompa	Sumur/ mata air terlindung	Sumur/ mata air tak terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	31,71	8,34	17,14	38,34	4,40	0,07
Perdesaan	7,03	25,52	8,14	37,73	7,61	13,96
Total	25,20	12,87	14,77	38,18	5,25	3,73
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga						
Laki-laki	23,35	13,66	15,08	38,98	5,06	3,87
Perempuan	32,81	9,60	13,49	34,91	6,03	3,16
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga						
Kuintil 1	4,24	14,66	13,33	51,21	9,56	7,00
Kuintil 2	11,28	14,13	18,04	44,21	7,49	4,85
Kuintil 3	17,31	15,23	14,29	43,66	5,88	3,63
Kuintil 4	31,41	14,29	15,93	32,44	2,86	3,08
Kuintil 5	61,79	6,02	12,25	19,37	0,46	0,11
Pendidikan Kepala Rumah Tangga						
SD kebawah	7,30	16,86	14,53	46,03	7,06	8,21
SMP atau sederajat	17,35	14,71	14,17	43,94	7,00	2,83
SMA keatas	41,86	9,13	15,14	30,15	3,26	0,46

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 19.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Cara Memperoleh Air Minum di D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/Kota	Cara Memperoleh Air Minum	
	Membeli	Tidak Membeli
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Kulonprogo	32,87	67,13
Bantul	26,89	73,11
Gunungkidul	43,84	56,16
Sleman	35,31	64,69
Yogyakarta	55,76	44,24
D.I. Yogyakarta	37,08	62,92

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 20.**Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum di D.I. Yogyakarta, 2018**

Karakteristik Rumah Tangga	Cara Memperoleh Air Minum	
	Membeli	Tidak Membeli
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Tipe Daerah		
Perkotaan	38,14	61,86
Perdesaan	34,11	65,89
Total	37,08	62,92
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		
Laki-laki	36,25	63,75
Perempuan	40,46	59,54
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	20,13	79,87
Kuintil 2	25,85	74,15
Kuintil 3	31,97	68,03
Kuintil 4	42,99	57,01
Kuintil 5	64,45	35,55
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
SD kebawah	24,37	75,63
SMP atau sederajat	32,72	67,28
SMA keatas	48,52	51,48

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 21.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Jarak Sumber Air Minum ke Penampungan Limbah/kotoran/tinja Terdekat di D.I. Yogyakarta, 2018**

Jarak Ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat			
Kabupaten/Kota	< 10 m	>= 10 m	Tidak tahu
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Kulonprogo	13,26	83,73	3,01
Bantul	26,57	67,86	5,57
Gunungkidul	13,65	86,13	0,22
Sleman	25,70	67,39	6,91
Yogyakarta	34,00	56,42	9,59
D.I. Yogyakarta	24,63	69,56	5,80

Sumber: Susenas 2018, BPS

Catatan: Sumber Air Minum khusus Sumur dan Mata Air

Lampiran 22.**Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Penampungan Limbah/kotoran/tinja Terdekat di D.I. Yogyakarta, 2018**

Karakteristik Rumah Tangga	Jarak Ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat		
	< 10 m	>= 10 m	Tidak tahu
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tipe Daerah			
Perkotaan	29,19	67,90	2,91
Perdesaan	11,24	87,13	1,64
Total	24,63	69,56	5,80
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga			
Laki-laki	24,55	73,00	2,45
Perempuan	26,12	70,58	3,30
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga			
Kuintil 1	24,79	72,65	2,56
Kuintil 2	26,25	70,58	3,17
Kuintil 3	23,83	73,98	2,18
Kuintil 4	26,38	69,91	3,71
Kuintil 5	21,44	78,01	0,56
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
SD kebawah	25,28	71,78	2,94
SMP atau sederajat	23,16	73,73	3,11
SMA keatas	25,06	72,92	2,03

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 23.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Sumber Air Utama Untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/ Kota	Sumber Air Utama Untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll				
	Leding	Sumur bor/pompa	Sumur/mata air terlindung	Sumur/mata air tak terlindung	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	24,43	5,62	54,89	14,92	0,14
Bantul	7,54	37,92	49,74	4,80	0,00
Gunungkidul	38,52	4,14	30,40	7,19	19,76
Sleman	7,16	24,64	61,92	6,14	0,14
Yogyakarta	18,26	47,17	34,57	0,00	0,00
D.I. Yogyakarta	16,43	25,16	48,48	6,11	3,82

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 24.**Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama Untuk Memasak dan Karakteristik Rumah Tangga di D.I. Yogyakarta, 2018**

Karakteristik Rumah Tangga	Sumber Air				
	Leding	Sumur bor/pompa	Sumur/mata air terlind	Sumur/mata air tak terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	12,84	30,79	51,31	5,00	0,06
Perdesaan	26,48	9,41	40,59	9,20	14,32
Total	16,43	25,16	48,48	6,11	3,82
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga					
Laki-laki	17,10	24,52	48,45	6,01	3,93
Perempuan	13,72	27,76	48,63	6,53	3,36
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga					
Kuintil 1	15,37	13,53	53,53	9,83	7,74
Kuintil 2	15,65	20,85	49,97	8,63	4,90
Kuintil 3	18,11	19,74	51,62	6,88	3,65
Kuintil 4	20,12	28,18	44,90	4,13	2,67
Kuintil 5	12,92	43,49	42,40	1,08	0,11
Pendidikan Kepala Rumah Tangga					
SD kebawah	17,93	17,64	48,33	7,83	8,27
SMP atau sederajat	16,96	19,87	51,80	8,14	3,23
SMA keatas	15,08	32,77	47,57	4,12	0,46

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 25.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Jarak Sumber untuk Memasak/Mandi/Cuci/Dll ke Penampungan Limbah/kotoran/tinja Terdekat di D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/Kota	Jarak Ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat		
	< 10 m	>= 10 m	Tidak tahu
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	13,26	83,73	3,01
Bantul	26,57	67,86	5,57
Gunungkidul	13,65	86,13	0,22
Sleman	25,70	67,39	6,91
Yogyakarta	34,00	56,42	9,59
D.I. Yogyakarta	24,63	69,56	5,80

Sumber: Susenas 2018, BPS

Catatan: Sumber Air untuk Memasak khusus Sumur dan Mata Air

Lampiran 26.

Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Jarak Sumber untuk Memasak/Mandi/Cuci/Dll ke Penampungan Limbah/kotoran/tinja Terdekat di D.I. Yogyakarta, 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Sumber Air Utama untuk Memasak Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat		
	< 10 m	>= 10 m	Tidak tahu
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tipe Daerah			
Perkotaan	27,88	65,27	6,85
Perdesaan	11,30	87,22	1,48
Total	24,63	69,56	5,80
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga			
Laki-laki	24,28	70,62	5,10
Perempuan	26,02	65,43	8,55
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga			
Kuintil 1	24,20	73,43	2,38
Kuintil 2	25,85	70,90	3,25
Kuintil 3	23,65	71,62	4,73
Kuintil 4	26,44	65,35	8,21
Kuintil 5	23,19	66,82	10,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
SD Kebawah	24,76	72,12	3,12
SMP atau sederajat	23,18	69,12	7,71
SMA keatas	24,98	67,92	7,10

Sumber: Susenas 2018, BPS

Catatan: Sumber Air untuk Memasak khusus Sumur dan Mata Air

Lampiran 27.
Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Sumber Penerangan Utama
Rumah Tangga D.I. Yogyakarta, 2018

Kabupaten/kota	Sumber Penerangan	
	Listrik	Bukan Lisrik
(1)	(2)	(3)
Kulonprogo	100,00	0,00
Bantul	99,83	0,17
Gunungkidul	99,84	0,16
Sleman	100,00	0,00
Yogyakarta	100,00	0,00
D.I. Yogyakarta	99,92	0,08

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 28.**Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Karakteristik Rumah Tangga D.I. Yogyakarta, 2018**

Karakteristik Rumah Tangga	Sumber Penerangan	
	Listrik PLN	Bukan Listrik
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Tipe Daerah		
Perkotaan	99,94	0,06
Perdesaan	99,88	0,12
Total	99,92	0,08
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		
Laki-laki	99,94	0,06
Perempuan	99,87	0,13
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	99,62	0,38
Kuintil 2	100,00	0,00
Kuintil 3	100,00	0,00
Kuintil 4	100,00	0,00
Kuintil 5	100,00	0,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
SD kebawah	99,80	0,20
SMP atau sederajat	100,00	0,00
SMA keatas	100,00	0,00

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 29.**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota dan Sumber Bahan Bakar untuk Memasak D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/ Kota	Sumber Bahan Bakar Memasak				
	Listrik	Gas Elpiji	Kayu Bakar	Lainnya	Tidak Memasak
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	0,39	54,63	44,66	0,11	0,21
Bantul	0,52	83,21	11,82	0,53	3,91
Gunungkidul	0,00	45,98	53,28	0,14	0,60
Sleman	2,13	85,57	5,74	0,07	6,48
Yogyakarta	2,78	77,25	0,66	2,60	16,71
D.I. Yogyakarta	1,20	73,15	19,77	0,53	5,35

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 30.**Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Sumber Bahan Bakar untuk Memasak D.I. Yogyakarta, 2018**

Karakteristik Rumah Tangga	Sumber Bahan Bakar Memasak				
	Tidak Memasak	Listrik	Gas Elpiji	Kayu Bakar	Lainnya
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Tipe Daerah					
Perkotaan	7,18	1,59	81,60	8,93	0,71
Perdesaan	0,23	0,12	49,56	50,05	0,04
Total	1,20	73,15	19,77	0,53	5,35
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga					
Laki-laki	3,84	0,88	74,96	19,86	0,46
Perempuan	11,52	2,54	65,74	19,39	0,82
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga					
Kuintil 1	1,51	0,00	53,08	44,71	0,70
Kuintil 2	0,36	0,14	71,15	27,84	0,50
Kuintil 3	1,14	0,21	81,23	16,81	0,61
Kuintil 4	3,37	1,52	86,59	8,32	0,20
Kuintil 5	20,35	4,15	73,69	1,15	0,66
Pendidikan Kepala Rumah Tangga					
SD kebawah	1,16	0,04	59,75	38,40	0,65
SMP atau sederajat	4,34	0,29	73,36	21,10	0,91
SMA keatas	8,98	2,41	83,72	4,57	0,32

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 31.**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak menurut Kabupaten/kota D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Air Minum	
	Air Layak	Tidak Layak
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Kulonprogo	77,92	22,08
Bantul	76,61	23,39
Gunungkidul	90,37	9,63
Sleman	79,19	20,81
Yogyakarta	80,13	19,87
D.I. Yogyakarta	80,62	19,38

Sumber: Susenas 2018, BPS

Tabel 32.

Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Air Minum Layak D.I. Yogyakarta, 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Air Minum	
	Air Layak	Air Tidak Layak
(1)	(2)	(3)
Tipe Daerah		
Perkotaan	78,25	21,75
Perdesaan	87,25	12,75
Total	80,62	19,38
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		
Laki-laki	80,66	19,34
Perempuan	80,48	19,52
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	73,04	26,96
Kuintil 2	74,24	25,76
Kuintil 3	80,53	19,47
Kuintil 4	83,03	16,97
Kuintil 5	92,28	7,72
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
SD kebawah	76,56	23,44
SMP atau sederajat	79,02	20,98
SMA keatas	84,34	15,66

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 33.**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak menurut Kabupaten/kota D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Akses Sanitasi	
	Layak	Tidak Layak
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Kulonprogo	70,83	29,17
Bantul	93,20	6,80
Gunungkidul	79,12	20,88
Sleman	94,51	5,49
Yogyakarta	95,54	4,46
D.I. Yogyakarta	88,92	11,08

Sumber: Susenas 2018, BPS

Tabel 34.

Persentase Rumah Tangga Tangga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak dan Karakteristik Rumah Tangga D.I. Yogyakarta, 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Sanitasi	
	Layak	Tidak Layak
(1)	(2)	(3)
Tipe Daerah		
Perkotaan	93,43	6,57
Perdesaan	76,30	23,70
Total	88,92	11,08
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		
Laki-laki	89,01	10,99
Perempuan	88,52	11,48
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	77,36	22,64
Kuintil 2	85,21	14,79
Kuintil 3	89,23	10,77
Kuintil 4	94,65	5,35
Kuintil 5	98,13	1,87
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
SD kebawah	83,19	16,81
SMP atau sederajat	86,74	13,26
SMA keatas	94,14	5,86

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 35.**Persentase Rumah Tangga Bertempat Tinggal Rumah Layak Huni menurut Kabupaten/kota D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Rumah Layak Huni	
	Layak Huni	Tidak Layak Huni
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Kulonprogo	97.52	2.48
Bantul	99.82	0.18
Gunungkidul	99.25	0.75
Sleman	99.93	0.07
Yogyakarta	99.47	0.53
D.I. Yogyakarta	99.46	0.54

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 36.**Persentase Rumah Tangga Bertempat Tinggal Rumah Layak Huni menurut Kabupaten/kota D.I. Yogyakarta, 2018**

Karakteristik Rumah Tangga	Rumah Layak Huni	
	Layak Huni	Tidak Layak Huni
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Tipe Daerah		
Perkotaan	99,75	0,25
Perdesaan	98,67	1,33
Total	99,46	0,54
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		
Laki-laki	99,51	0,49
Perempuan	99,27	0,73
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	98,23	1,77
Kuintil 2	99,26	0,74
Kuintil 3	99,90	0,10
Kuintil 4	99,92	0,08
Kuintil 5	100,00	0,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
SD kebawah	99,03	0,97
SMP atau sederajat	99,31	0,69
SMA keatas	99,85	0,15

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 37.**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Kabupaten/kota D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Sumber Air Bersih	
	Air Bersih	Air Tidak bersih
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Kulonprogo	77,93	22,07
Bantul	76,44	23,56
Gunungkidul	70,08	29,92
Sleman	79,32	20,68
Yogyakarta	79,12	20,88
D.I. Yogyakarta	76,63	23,37

Sumber: Susenas 2018, BPS

Tabel 38.

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih dan Karakteristik Rumah Tangga D.I. Yogyakarta, 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Sumber Air Bersih	
	Air Bersih	Air Tidak Bersih
(1)	(2)	(3)
Tipe Daerah		
Perkotaan	77,99	22,01
Perdesaan	72,82	27,18
Total	76,63	23,37
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		
Laki-laki	76,51	23,49
Perempuan	77,14	22,86
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	65,37	34,63
Kuintil 2	69,13	30,87
Kuintil 3	76,28	23,72
Kuintil 4	79,87	20,13
Kuintil 5	92,52	7,48
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
SD kebawah	67,71	32,29
SMP atau sederajat	75,68	24,32
SMA keatas	84,01	15,99

Sumber: Susenas 2018, BPS

Lampiran 39.**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Rumah Kumuh dan Karakteristik Rumah Tangga D.I. Yogyakarta, 2018**

Kabupaten/kota	Kriteria Kumuh	
	Tidak Kumuh	Kumuh
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Kulonprogo	99,63	0,37
Bantul	97,92	2,08
Gunungkidul	99,76	0,24
Sleman	99,64	0,36
Yogyakarta	97,02	2,98
D.I. Yogyakarta	98,87	1,13

Sumber: Susenas 2018, BPS

Tabel 40.

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Rumah Kumuh dan Karakteristik Rumah Tangga D.I. Yogyakarta, 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Kreteria Kumuh	
	Tidak Kumuh	Kumuh
(1)	(2)	(3)
Tipe Daerah		
Perkotaan	98,59	1,41
Perdesaan	99,67	.33
Total	98,87	1,13
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		
Laki-laki	98,85	1,15
Perempuan	98,98	1,02
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
Kuintil 1	97,78	2,22
Kuintil 2	98,40	1,60
Kuintil 3	99,53	0,47
Kuintil 4	99,14	0,86
Kuintil 5	99,52	0,48
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
SD atau sederajat	99,12	0,88
SMP atau sederajat	98,05	1,95
SMA keatas	98,93	1,07

Sumber: Susenas 2018, BPS

Daftar Pustaka

- Azwar, A. 1996. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2018*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- _____. 2018. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- _____. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- _____. 2015. *Pemanfaatan data Susenas Kor dan KP (Pengolahan dan Meta Data Indikator/Tabel Statistik)*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2002. *Pedoman Teknis Rumah Sehat*. Ditjen PPM dan PL. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999. *Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan*. Depkes RI. Jakarta
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1989. *Persyaratan Perumahan dan Pemukiman*. Dirjen PPM dan PLP : Jakarta
- Keman/ Soedjajadi. 2005. *Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman*. Jakarta.
- Krieger J and Higgins DL. (2002). *Housing and Health : Time Again for Public Action*. Am J Public Health 92:5. 758-759.
- Mubarak, W.I., Chayatin, N.. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Salemba Medika.
- Mukono, H.J. 2000. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Airlangga University. Press.Surabaya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Republik Indonesia 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tahun 2016 No 101*. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang no 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 7*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Riviwanto , Muchsin DKK.. 2011. *Penyehatan Permukiman*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Sanropie, Djasio, dkk. 1989. *Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Sanropie D. (1992). *Pedoman Bidang Studi Perencanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman*. Jakarta : Departemen Kesehatan R.I.

Sanropie, J., Gunarso, LT Adisapto, W.. 1991. *Pengawasan penyehatan lingkungan Pemukiman*. Jakarta: Pusdiknakes Depkes.

Singa Siprianus, maran, A.A. 2013. *Penggunaan Bahan bakar dan Faktor Risiko Kejadian ISPA pada Balita di Kelurahan Sikumana*. 2013. Jurnal Info Kesehatan Vol 11 Juni 2013. Kupang.

<http://ciptakarya.pu.go.id/pspam/?section=berita&id=bGVt&judul=Ketersediaan-Air-Bersih-Tingkatkan-kesejahteraan-Rakyat-Gunung-Kidul>

<https://yogyakarta.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://yogyakarta.bps.go.id>

ISSN 2656-2588



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul

Telp.(0274)4342234 Fax.(0274) 4342230 email: bps3400@mailhost.go.id